



Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Badan Layanan Umum
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

LAPORAN KINERJA

Tahun 2025



Jl. Martoloyo PO BOX 22 Tegal, Kode Pos 52122



(0282) 356393



<https://kkp.go.id/unit-kerja/bppsdmkp/upt/bppp-tegal.html>

<https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-tegal/>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat Serta Karunia-Nya, Badan layanan Umum (BLU) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPPP) Tegal telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPPPP Tegal Tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj BLU BPPPP Tegal Tahun 2025 disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran Tahun 2025 yang terkait dengan evaluasi pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan disisi lain laporan kinerja merupakan alat kendali, pemacu dan umpan balik peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.

Mengingat bahwa Laporan Kinerja merupakan indikator keberhasilan dari suatu penyelenggaraan organisasi pemerintahan, kami berusaha dengan sebaik mungkin untuk dapat menyajikan laporan ini agar dapat digunakan dalam menyusun kebijakan di BPPPP Tegal.

Tegal, 19 Januari 2026
Pit. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal

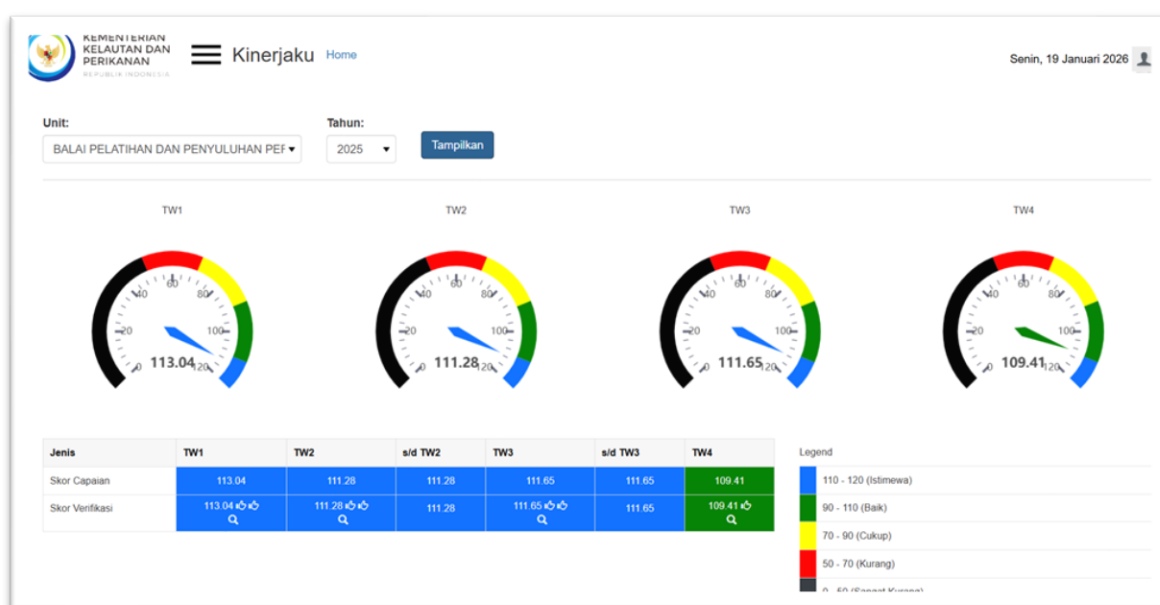
AGUS SUBIJAKTO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan BPPP Tegal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja BPPP Tegal pada Tahun 2025 selaras dengan kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sehingga BPPP Tegal selaku UPT yang berada di bawahnya turut berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPSDMKP. BPPP Tegal memiliki tanggung jawab untuk mendukung 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja, secara umum kinerja BPPP Tegal pada Tahun 2025 masuk dalam kategori **BAIK**. Dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi **109,41%** seperti tampilan grafik dashboard berikut ini :



Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal yang terukur pada Tahun 2025 terdiri dari 14 (empat belas) indikator yang telah tercapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	
					Capaian	%
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Tersempit di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75	95,79	120 (127,72)
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	12.540	15.629	120 (124,63)
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	14,26	25,85	120 (181,28)
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	2.900	3.723	120 (128,38)
		5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	2	2	100
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	2	2	100
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	100	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83	85,04	102.46
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85	100	117,65
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	80	83,50	104.38
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80	97,50	120 (121,88)

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	
					Capaian	%
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80	100	120 (125)
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	71,5	100	120 (139,86)
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok)	50	50	100

Pagu anggaran awal yang dialokasikan kepada BPPP Tegal Tahun 2025 adalah sebesar Rp 37.153.704.000,- kemudian direvisi menjadi 44.973.223.000,- dengan anggaran blokir sebesar 7.021.064.000 sehingga pagu aktif sebesar Rp 37.952.159.000,- dan telah terrealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 35,603,728,631,- atau 93,81%. Secara umum kinerja BPPP Tegal cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian indikator yang lebih dari 120 % agar dilakukan penyesuaian target pada perencanaan tahun berikutnya
2. Dalam pengumpulan data dukung masih ada ditemukannya duplikasi data, data yang kurang lengkap yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan serta link yang tidak dapat diakses, maka perlu dilakukan verifikasi data secara berkala dan teliti sehingga capaian kinerja sesuai dengan data dukung yang ada.

Laporan Kinerja ini berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* Balai. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Balai. BPPP Tegal berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi BPPP Tegal	3
1.4. Struktur Organisasi.....	4
1.5. Keragaan SDM BPPP Tegal	5
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	7
1.7. Potensi dan Permasalahan	8
1.7.1 Potensi	8
1.7.2 Permasalahan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
1.1. Rencana Strategis	12
1.1.1 Visi.....	13
1.1.2. Misi	14
1.1.3. Tujuan	14
1.1.4. Sasaran Program.....	14
1.2. Strategi Pelaksanaan Program BPPP Tegal	17
1.3. Rencana Kerja Tahun 2025	18
1.4. Penetapan Kinerja Tahun 2025	19
1.5. Pengukuran Kinerja.....	22
1.5.1 Rumus Pengukuran	22
1.5.2 Metode Pengukuran Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	24

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	72
3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Sumber Daya	74
3.4. Lain – lain (Capaian Kinerja BLU).....	79
BAB IV PENUTUP.....	83
4.1. Capaian Kinerja Utama.....	83
4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi	85
4.3. Permasalahan dan Rekomendasi.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Tegal.....	4
Gambar 2. Komposisi Pegawai BPPP Tegall.....	5
Gambar 3. Komposisi Pegawai BPPP Tegal dibandingkan dengan tahun sebelumnya	6
Gambar 4. Keragaan pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan	6
Gambar 5. Nilai Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025 pada dashboard aplikasi kinerjaku	24
Gambar 6. Grafik Purnawidya Pelatihan Masyarakat berdasarkan Jenis Pelatihan, Kompetensi, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	32
Gambar 7. Perbandingan Capaian IKU 2 dengan tahun sebelumnya.....	32
Gambar 8. Perbandingan Capaian PNPB dengan tahun Sebelumnya	37
Gambar 9. Perbandingan Capaian SDM KP yang bersertifikasi kompetensi	40
Gambar 10. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku utama/Pelaku Usaha yang disuluh dengan tahun sebelumnya	70
Gambar 11. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU Kelompok Pelaku Utama / Pelaku Usaha yang disuluh dengan unit kerja sejenis.....	70
Gambar 12. Realisasi per output anggaran BPPP Tegal Tahun 2025	72
Gambar 13. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Tegal Tahun 2025 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal Tahun 2025.....	iv
Tabel 2. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029.....	15
Tabel 3. Rencana Kerja Tahun 2025	18
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi PK BPPP Tegal dengan Puslat Tahun 2025	20
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi PK BPPP Tegal dengan Pusluh Tahun 2025	21
Tabel 6. Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025	25
Tabel 7. Capaian IKU 1 Persentase lulusan pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%).....	28
Tabel 8. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 1 DUDIKA dengan unit kerja sejenis	29
Tabel 9. Capaian IKU 2 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih BPPP Tegal....	31
Tabel 10. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 2 Masyarakat KP dilatih dengan unit kerja sejenis.....	33
Tabel 11. Capaian IKU 3 Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal.....	36
Tabel 12. Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan IV IKU 3 Nilai PNBPN dengan unit kerja sejenis.....	37
Tabel 13. Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang)	39
Tabel 14. Capaian IKU 5 Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit).....	42
Tabel 15. Capaian IKU Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	44
Tabel 16. Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Tahun 2025.....	47
Tabel 17. Capaian IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%).....	48

Tabel 18. Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Tahun 2025.....	48
Tabel 19. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%).....	51
Tabel 20. Kategori Nilai Indeks Profesionalitas ASN	52
Tabel 21. Capaian IKU 8 Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	53
Tabel 22. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 8 Indeks Profesionalitas ASN dengan unit kerja sejenis	53
Tabel 23. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	55
Tabel 24. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan unit kerja sejenis.....	55
Tabel 25. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal.....	57
Tabel 26. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP dengan unit kerja sejenis.....	58
Tabel 27. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal.....	59
Tabel 28. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis.....	60
Tabel 29. Capaian IKU 12 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	62
Tabel 30. Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan IV IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis	63
Tabel 31. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal.....	65
Tabel 32. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan unit kerja sejenis.....	66
Tabel 33. Capaian IKU 14 Kelompok Pelaku Utama / Pelaku Usaha yang disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)	69
Tabel 34. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	72
Tabel 35. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama.....	73

Tabel 36. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPPP Tegal Tahun 2025.....	75
Tabel 37. Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025.....	84
Tabel 38. Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025	85
Tabel 39. Permasalahan dan Rencana Aksi	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Revisi I Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dengan Pusat Penyuluhan Tahun 2025.....	2
Lampiran 2. Revisi II Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dengan Pusat Pelatihan Tahun 2025	4
Lampiran 3. Revisi I Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dengan Pusat Pelatihan Tahun 2025	7
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Awal BPPP Tegal dengan Pusat Pelatihan Tahun 2025	3
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Awal BPPP Tegal dengan Pusat Penyuluhan Tahun 2025	6
Lampiran 6. SK Tim Pengelola Kinerja Tahun 2025	1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan tersebut merupakan program presiden terpilih dan arah pembangunan jangka panjang nasional.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, pencapaian target-target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, dan peta jalan Ekonomi Biru maka kerangka pikir pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan mindset pembangunan sektor kelautan perikanan dari pembangunan berorientasi produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur yang mempertimbangkan daya dukung dan berorientasi pasar dengan menempatkan ekologi sebagai panglima untuk mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional 2025-2029.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah *“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah *“Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”*.

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan focus pada Misi Asta Cita ke 2, 5, dan 8. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5 dan 6;
3. Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7

Dalam rangka mendukung misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, BPPSDMKP menetapkan misi *“Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”*.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal turut berkontribusi dan mendukung misi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) BPPP Tegal Tahun 2025 memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian pada Tahun 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan serta referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya lingkup BPPP Tegal;
3. Sebagai umpan balik (*Feedback*) untuk perbaikan berkesinambungan bagi BPPP Tegal untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Tugas dan Fungsi BPPP Tegal

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

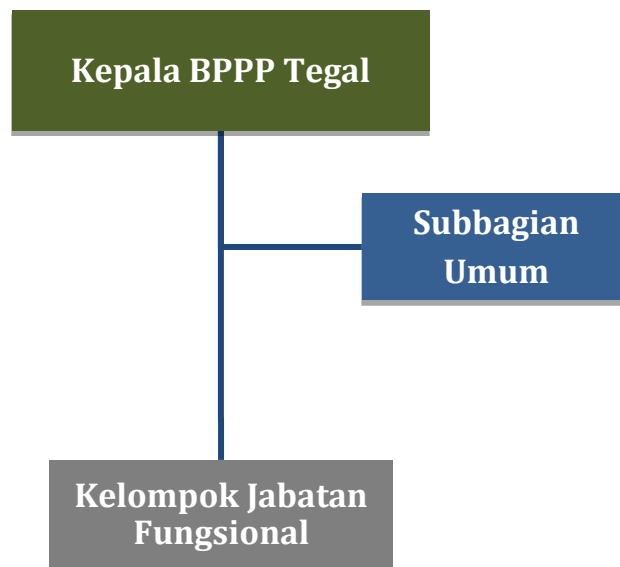
BPPP Tegal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan;
- b. penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- d. penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- f. pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;

- g. pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Struktur Organisasi di BPPP Tegal dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Tegal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala BPPP Tegal dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum

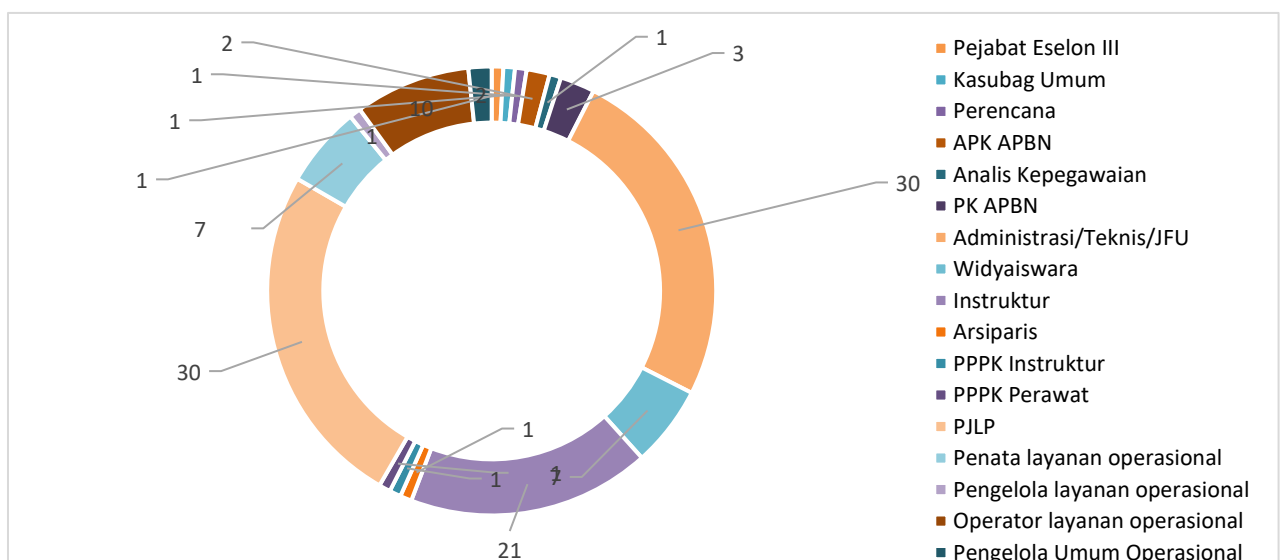
Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.

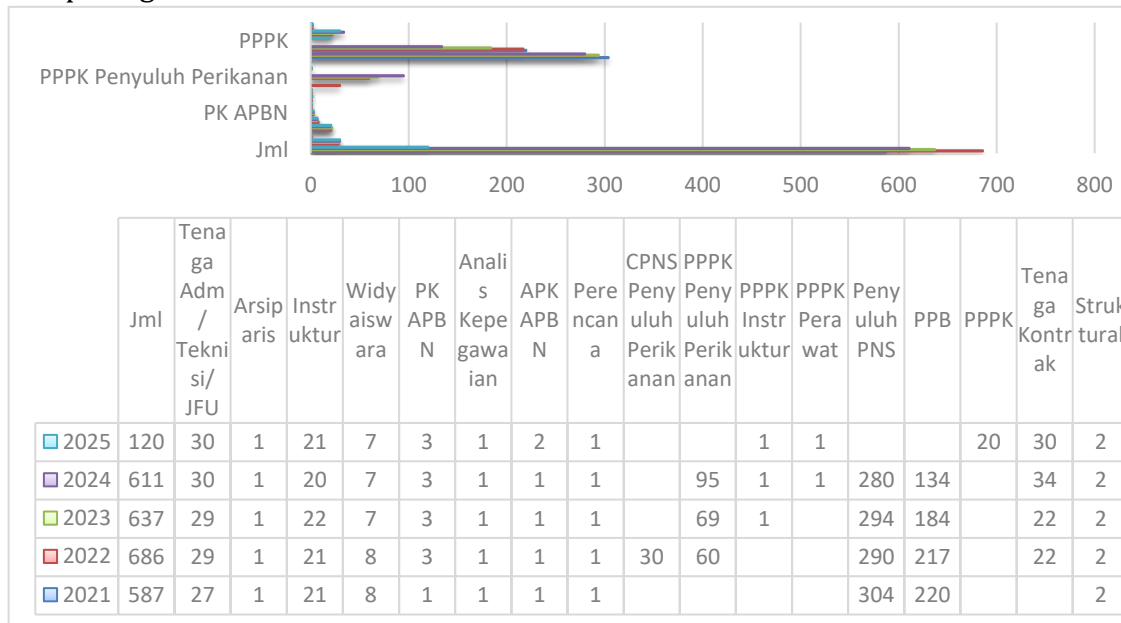
1.5. Keragaan SDM BPPP Tegal

Jumlah pegawai negeri sipil di BPPP Tegal per 1 Januari 2026 sebanyak 120 orang pegawai dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut:



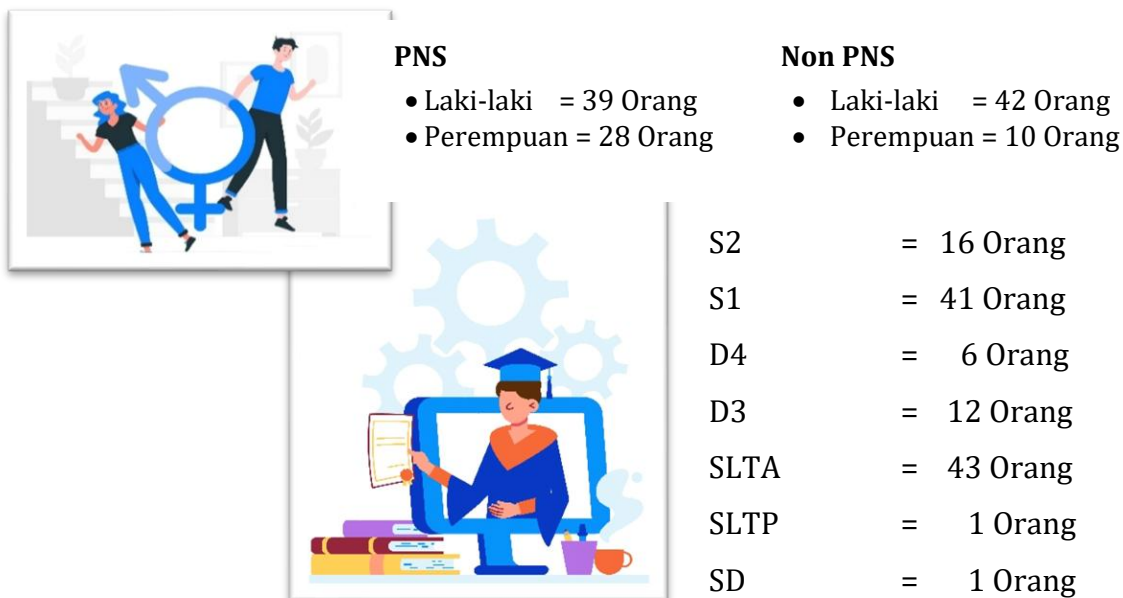
Gambar 2. Komposisi Pegawai BPPP Tegal

Komposisi pegawai BPPP Tegal dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Komposisi Pegawai BPPP Tegal dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Keragaan pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 4. Keragaan pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LKj BPPP Tegal Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar, merupakan pembuka awal laporan yang berisi pandangan umum tentang isi laporan dan pengesahan laporan;

Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun tersebut;

Bab I – Pendahuluan,

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

Capaian Kinerja Organisasi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Realisasi Anggaran:

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup,

Kesimpulan umum atas capaian Kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran,

Perjanjian Kinerja, penghargaan yang diraih atau dokumen lainnya.

1.7. Potensi dan Permasalahan

1.7.1 Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 7 (tujuh) propinsi di No. Wilayah kerja BPPP Tegal yaitu propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Lampung dan Kalimantan Barat. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

BPPP Tegal juga membawahi 5 PPPK Penyuluh, 4 PPPK Penyuluh Kota Tegal dan 1 PPPK Penyuluh Kabupaten Tegal. BPPP Tegal bertugas menyiapkan bahan pengembangan

penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas PPPK Penyuluh.

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Tegal dalam mencapai tujuan organisasi:

1. Memiliki SDM yang ahli, profesional dan berpengalaman dibidangnya serta bersertifikasi yang berkomitmen kuat untuk berkembang dan memajukan diklat;
2. Memiliki sarpras diklat yang memadai dan representatif;
3. Penyelenggaraan *Basic Safety Training* (BST), *Basic Safety Training* Kapal Layar Motor (BST KLM), *Basic Safety Training - Fisheries I* (BSTF I), *Basic Safety Training - Fisheries II* (BSTF II) dan Rating Internasional;
4. Memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 bidang Kelautan dan Perikanan yang telah di lisensi oleh BNSP dan Tempat Uji Kompetensi / TUK LSP Kelautan dan Perikanan;
5. Sebagai tempat kedudukan PUKAKP Wilayah V;
6. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu (ISO 9001 : 2015);
7. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran staf untuk mencapai tujuan organisasi yaitu dengan adanya dukungan kebijakan dari Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan mutu diklat;
8. Letak yang strategis berada pada jalur pantura Jawa, ditengah Kota Tegal dan berada pada lingkungan perikanan yang produktif;
9. Forum komunikasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta (bidang perikanan);
10. Kebutuhan tenaga kerja yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengikuti diklat;
11. Peningkatan kerjasama dengan instansi sejenis dan asosiasi industri/profesi;
12. Kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kediklatan di dalam dan luar negeri;
13. Optimalisi pemanfaatan fasilitas BPPP Tegal yang tersedia;

14. Indonesia telah meratifikasi STCW-F pada tahun 2019;
15. Permen KP No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
16. Beberapa diklat kepelautan masih dalam proses approval;
17. BPPP Tegal mampu menghasilkan produk perikanan yang layak dipasarkan.
18. BPPP Tegal mampu menghasilkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas garam rakyat.
19. BPPP Tegal memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar.
20. BPPP Tegal mampu melakukan pelatihan daring yang memungkinkan peserta melakukan praktek dan dipandu langsung oleh pelatih.

1.7.2 Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Tegal memiliki beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum terbitnya penetapan dan pengaturan SOTK yang mengatur unit kerja level UPT setelah perubahan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP, menyebabkan masih melekatnya fungsi penyuluhan pada BPPP Tegal sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan fungsi pelatihan;
2. Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas sedangkan permintaan pelatihan terus bertambah;
3. Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
4. Kurikulum dan modul pembelajaran belum seluruhnya tersedia dan terstandar;

5. Kompetensi dan jumlah SDM BPPP Tegal perlu ditambah dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pelatihan seiring telah berubahnya menjadi Badan Layanan Umum;
6. Kurangnya penerapan regulasi terhadap persyaratan kompetensi pekerja/calon pekerja di bidang kelautan dan perikanan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1. Rencana Strategis

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan focus pada Misi Asta Cita ke 2, 5, dan 8. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5 dan 6;
3. Meningkatkan Daya Saing Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7

Dalam rangka mendukung misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, BPPSDMKP menetapkan misi *“Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inofatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”*. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) berkontribusi pada visi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

1.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah *“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah *“Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”*.

Visi BPPP Tegal pada tahun 2025-2029 adalah menggunakan Visi BPPSDM, yaitu *“Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”*.

1.1.2. Misi

Dalam rangka mendukung misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, serta misi BPPSDMKP yaitu “*Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional*”; Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) berkontribusi pada misi tersebut melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

1.1.3. Tujuan

Untuk mewujudkan Misi BPPSDM Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing” dengan indikator meningkatnya meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

Fokus utama tujuan strategis terletak pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang inovatif dan berdaya saing, kelembagaan kelompok pelaku usaha yang kuat dan mandiri serta menghasilkan calon wirausaha muda baru yang berlatar belakang pendidikan serta menjawab kebutuhan calon tenaga kerja melalui adanya keterhubungan lebih kuat antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.4. Sasaran Program

Sasaran program merupakan perwujudan dari kontribusi BPPSDMKP dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS4 Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dan SS5 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan

Berkualitas. Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPPSDMKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan tahun 2025-2029, BPPSDMKP menetapkan sasaran program dan indikator sebagaimana tabel:

Tabel 2. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Target 2025	Target 2029
SS-4 : Meningkatnya Kualitas SDM KP	SP-1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM KP	Persentase Lulusan pendidikan / pelatihan KP yang kompeten / tersertifikasi dan terserap di DUDIKA	75%	79%
		Persentase peningkatan omzet kelompok pelaku utama yang ditingkatkan kelasnya	50%	58%
SS-5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas	SP-2 : Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPSDM	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDM (Indeks)	86	88

Berdasarkan Permen KP Nomor 5 Tahun 2025 Tanggal 23 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka terdapat perubahan sasaran kegiatan program pelatihan dan penyuluhan KP yang dilaksanakan oleh BPPP Tegal adalah sebagai berikut :

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

SK.1 Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Pelatihan SDM KP diselenggarakan guna menjembatani kesenjangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama/pelaku usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%) dengan target indikator kinerja ini pada Tahun 2025 sebesar 75% dan tahun 2029 sebesar 79%;
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang) ditargetkan sebanyak 12.540 orang pada Tahun 2025 dan tahun 2029 sebesar 21.160 orang;

- c) Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar) dengan target Tahun 2025 sebesar Rp.14.262.000.000,- dan tahun 2029 sebesar Rp 21.100.000.000,-;
- d) Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 2.900 orang.
- e) Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit) Tahun 2025 target indikator kinerja ini sebanyak 2 unit dan tahun 2029 sebanyak 2 Unit;
- f) Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit) Tahun 2025 target indikator kinerja ini sebanyak 2 unit dan tahun 2029 sebanyak 2 Unit.

SK.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal ingin menjadi instansi yang memiliki kinerja yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu, tujuan ini adalah mutlak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%), tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%;
- b) Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks), tahun 2025 ditargetkan indeks sebesar 83 dan tahun 2029 sebesar 83;
- c) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%), tahun 2025 ditargetkan 85% dan tahun 2029 sebesar 89%;
- d) Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai), tahun 2025 ditargetkan Nilai 80 dan tahun 2029 sebesar 83;
- e) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%), tahun 2025 dengan target 80% dan tahun 2029 sebesar 84%;
- f) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%), tahun 2025 dengan target 80% dan tahun 2029 sebesar 84%;
- g) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai), dengan target Nilai 71,5

SK.3 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Penyuluhan KP dilaksanakan guna memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, didukung oleh indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok) Tahun 2025 target indikator kinerja ini sebanyak 50 kelompok.

1.2. Strategi Pelaksanaan Program BPPP Tegal

Strategi pencapaian sasaran kegiatan pelatihan dan penyuluhan BPPP Tegal adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan mensinergikan unit-unit kerja di BPPP Tegal sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP dapat terlaksana dengan baik. Penempatan SDM yang tepat pada unit-unit kerja juga dapat berkontribusi dalam menghasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan stakeholder.

- b) Ketenagaan

Tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam terlaksananya kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang baik. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting untuk dilaksanakan. Peningkatan kualitas ketenagaan BPPP Tegal dapat dilaksanakan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, magang, dan kegiatan lainnya.

- c) Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan KP

Monitoring dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Melalui monitoring dan evaluasi, kualitas penyelenggaraan kegiatan dapat dipantau dan diperbaiki jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

d) Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selain memenuhi kebutuhan stakeholder, kerjasama juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menambah daya jangkau kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang terbatas oleh wilayah kerja dan anggaran.

e) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPPP Tegal masih belum sesuai standar penyelenggaraan pelatihan. Untuk itu, peningkatan sarana dan prasarana mutlak diperlukan guna menghasilkan purnawidya yang berkualitas.

1.3. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Kegiatan, BPPP Tegal didukung dengan pagu anggaran awal yang dialokasikan kepada BPPP Tegal Tahun 2025 adalah sebesar Rp 37.153.704.000,- kemudian direvisi menjadi 44.973.223.000,- dengan anggaran blokir sebesar 7.021.064.000 sehingga pagu aktif sebesar Rp 37.952.159.000,- yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		ANGGARAN (Rp.000) - Awal	ANGGARAN (Rp.000) - Revisi I	ANGGARAN (Rp.000) - Revisi II
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	21.474.992	62.531.367	29.041.269
2375	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	21.426.192	62.482.567	29.031.269
7020	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	48.800	48.800	10.000
032.12.WA	Program Dukungan Manajemen	15.678.712	15.715.712	15.931.954
2378	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.678.712	15.715.712	15.931.954
Total Anggaran		37.153.704	78.247.079	44.973.223

1.4. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN & RB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik;
- 2) Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada *Logical Framework Analysis* (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek. Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Triwulan IV Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan pada 17 Desember 2025 dan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan pada 11 Desember 2025. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025.

Adapun indikator-indikator pada Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dan perubahan targetnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi PK BPPP Tegal dengan Puslat Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK (AWAL)	TARGET PK REV I (AGUSTUS)	TARGET PK REV II (DESEMBER)
1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	8.817	8.817	
	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)			75
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	12.540	17.160	12.540
3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	7,81	14,26	14,26
4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	530	1.300	2.900
5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1	2	2
6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	1	2	2
7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	100	100
8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (Indeks)	83	83	83
9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85	85	85
10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	80	80	80
11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80	80	80
12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80	80	80
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	71,50	71,50	71,50

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi PK BPPP Tegal dengan Pusluh Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	PK AWAL		PK REV I (DESEMBER)	
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok)	50	Rp 48.800.000	50	Rp 10.000.000

Selama tahun 2025, Perjanjian Kinerja BPPP Tegal telah mengalami 2 kali perubahan sebagai berikut :

1. Pada bulan Agustus BPPP Tegal mengalami perubahan target Indikator Kinerja Utama dengan Puslat KP dikarenakan adanya penambahan anggaran kegiatan pelatihan dan penyuluhan perikanan yang semula sebesar Rp 21.426.192.000,- menjadi Rp 34.698.147.000,- dan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPSPDMKP yang semula Rp 15.678.712.000,- menjadi Rp 15.715.712.000,- yang mengakibatkan penambahan volume di kegiatan pelatihan yang mendukung program prioritas kelautan dan perikanan, kegiatan sertifikasi dan ujian, dan nilai capaian PNBK. Adapun target Indikator Kinerja yang berubah adalah sebagai berikut :
 - a. IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang), target semula 12.540 orang menjadi 17.160 orang.
 - b. IKU Nilai PNBK Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar), target semula 7,81 menjadi 14,26
 - c. IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang), target semula 530 orang menjadi 1.300 orang.
 - d. IKU Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit), target semula 1 unit menjadi 2 unit.
 - e. IKU Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit), target semula 1 unit menjadi 2 unit.
2. Pada bulan Desember BPPP Tegal mengalami perubahan target Indikator Kinerja yang dikarenakan adanya pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan pelatihan Kelautan dan Perikanan yang semula sebesar Rp 34.698.147.000,- menjadi Rp

29.031.269.000,- , kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPSPDMKP yang semula Rp 15.715.712.000,- menjadi Rp 15.931.954.000,- serta kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang semula Rp 48.800.000,- menjadi Rp 10.000.000,- Adapun target Indikator Kinerja yang berubah adalah sebagai berikut :

- a. IKU Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja yang semula menggunakan satuan Orang (8.817) menjadi satuan persentase (75%)
- b. IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang), target semula 17.160 orang menjadi 12.540 orang.
- c. IKU SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (Orang), target semula 1.300 orang menjadi 2.900 orang

1.5. Pengukuran Kinerja

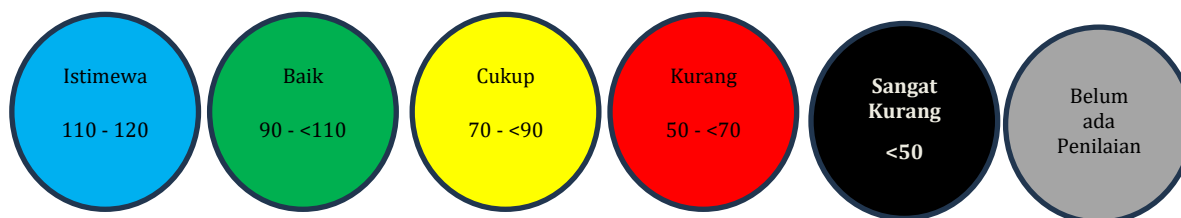
Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Capaian tersebut kemudian dilakukan penginputan data melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id dan menggunakan *Logical Framework Analysis (LFA)* adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencanaan untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek

1.5.1 Rumus Pengukuran

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;

- 3) Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status indeks capaian IKU seperti tabel sebagai berikut:



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator.

1.5.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Tegal dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran yang bertanggungjawab dalam pengukuran adalah Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Tegal Nomor: B.8/SK/BPPP.TGL/KP.110/I/2025 tentang Tim Pengelola Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua kelompok di BPPP Tegal. Berdasarkan laporan sub koordinator penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Kelompok Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan

BAB III

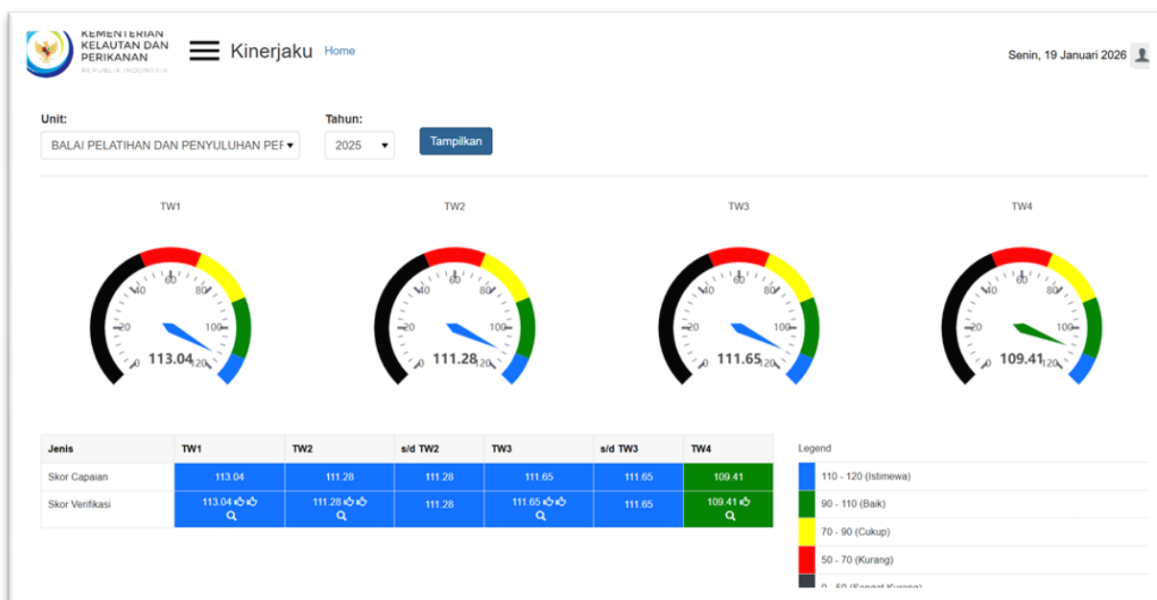
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Kinerja Indikator Utama sebesar 109,41 %, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Nilai Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025 pada dashboard aplikasi kinerjaku

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Tegal yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2025 dapat tercapai.

Pada Tahun 2025 BPPP Tegal memiliki kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	
					Capaian	%
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75	95,79	120 (127,72)
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	12.540	15.629	120 (124,63)
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	14,26	25,85	120 (181,28)
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP	2.900	3.723	120 (128,38)

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	
					Capaian	%
			Tegal (Orang)			
		5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	2	2	100
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	2	2	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	100	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83	85,04	102.46
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85	100	117,65%
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)	80	83,50	104,38
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80	97,50	120 (121,88)
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80	100	120 (125)
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	71,5	100	120 (139,86)
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok)	50	50	100

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan

BPPP Tegal berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi KKP, selaras dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dalam menjalankan misi Presiden dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan. Sesuai Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset kelautan dan perikanan.

Salah satu penjabaran misi tersebut adalah dengan menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, BPPP Tegal didukung oleh indikator kinerja utama antara lain (1) Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal Yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja dan (2) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang).

Indikator Kinerja Utama 1

Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan melalui pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat/pelatihan agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri.

IKU 1 Persentase lulusan pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%) merupakan persentase lulusan pelatihan yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang telah bekerja di DUDI dan atau menerapkan hasil pelatihan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap dibandingkan dengan jumlah total lulusan pelatihan masyarakat yang diselenggarakan Tahun 2025 dengan anggaran Rupiah Murni.

Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Tegal diukur dengan menghitung jumlah lulusan pelatihan KP Kompeten yang mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan/atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja yang dihitung dari lulusan pada tahun berjalan yang bersumber dari Rupiah Murni.

IKU ini mengukur sejauh mana lulusan pelatihan kelautan dan perikanan mampu menerapkan hasil pelatihan pada kegiatan di sektor usaha dan industri kelautan dan perikanan setelah menyelesaikan pelatihan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pelatihan dalam mempersiapkan peserta untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan sektor usaha bidang kelautan dan perikanan. Formula perhitungan dengan menghitung Jumlah lulusan pelatihan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang berhasil memperoleh pekerjaan dan atau mengembangkan usahanya di dunia usaha/industri dengan menggunakan kuisioner. Adapun data capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Capaian IKU 1 Persentase lulusan pelatihan KP yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IKU 1. Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
60	65	77,83	75	75	95,79	120 (127,72)	27,72	79	121,25

Berdasarkan data pada tabel diatas persentase realisasi lulusan pelatihan yang terserap di dunia kerja/industri di BPPP Tegal pada terus mengalami kenaikan dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2021 persentase realisasi lulusan pelatihan yang terserap di dunia industri sebanyak 60%, tahun 2022 sebanyak 65%, tahun 2023 sebanyak 77,83%, dan tahun 2024 sebanyak 75%. Pada Tahun 2025 persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri BPPP Tegal ditargetkan sebesar 75% dari realisasi purnawidya masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Tegal yang

bersumber dari anggaran Rupiah Murni sebanyak 522 orang sehingga dapat dilihat realisasi indikator ini adalah sebesar 95,79% yaitu sebanyak 500 orang atau tercapai sebesar 120 (127,72)% dengan proporsi 461 orang laki-laki dan 39 orang perempuan, kondisi ini menunjukkan bahwa lulusan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap di Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja didominasi peserta laki-laki karena karakteristik sektor kelautan dan perikanan yang masih didominasi oleh pekerjaan berbasis fisik serta peran tradisional laki-laki sebagai pelaku utama usaha terutama pada bidang penangkapan ikan. Sementara itu, peserta perempuan masih terbatas pada bidang budidaya, serta pengolahan dan pemasaran.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami kenaikan sebesar 27,72%, hal ini disebabkan karena formula penghitungan berbeda dengan tahun sebelumnya yang menghitung dari seluruh purnawidya pelatihan, baik yang bersumber dari anggaran BLU maupun RM. Untuk tahun ini perhitungan purnawidya difokuskan untuk pelatihan yang menggunakan anggaran RM sehingga memudahkan dalam ketelusuran purnawidya yang terserap di Dunia Industri/Kerja. Sedangkan jika dibandingkan dengan target rencana kegiatan 2025 - 2029 tercapai sebesar 133,04% dari target tahun 2029 sebesar 79%. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 8. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 1 DUDIKA dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	75	75	120 (127,72)%
2	BPPP Medan	75	76,75	102,33
3	BPPP Banyuwangi	75	83,11	110,81
4	BPPP Bitung	75	75,16	100,21
5	BPPP Ambon	75	75	100

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator ini dengan unit kerja sejenis dimana capaian BPPP Tegal lebih tinggi dibandingkan dengan balai lain, hal ini disebabkan karena adanya perubahan formula perhitungan manual IKU pada Triwulan IV.

Faktor penyebab keberhasilan pada indikator ini adalah :

- Penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan pada awal tahun dan sesuai jadwal sehingga memudahkan pengukuran capaian
- Kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia usaha/dunia industri saat ini.
- SDM Pelatih yang berkompetensi dan tersertifikasi
- Sistem pendataan purnawidya yang terorganisir.
- Adanya pendampingan bagi lulusan pelatihan oleh penyuluh di Kab/kota sehingga hambatan dalam usaha kelautan dan perikanan dapat diatasi.

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya, terdapat efisiensi sumberdaya manusia dan efisiensi anggaran karena dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada penganggaran khusus melainkan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang tersebar di wilayah kerja BPPP Tegal melalui teknik pendataan monitoring dengan menggunakan media *google form*. Kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan antara lain 1) Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan untuk menghasilkan capaian pelaku utama/usaha yang kompeten. 2) Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pasca Diklat (EPD) kepada purnawidya pelatihan RM BPPP Tegal dengan pengisian kuisioner melalui *google form* sehingga membantu mempercepat pengumpulan data 3) Ketercapaian pada RO 2375.SCC.831.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih dimana pada tahun ini tercapai sebanyak 15.629 orang (>120%) dari target 12.540 orang dengan rincian purnawidya pelatihan yang bersumber dari anggaran BLU sebanyak 15.107 orang dan purnawidya pelatihan yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni sebanyak 522 orang sehingga dapat dilihat realisasi indikator ini adalah sebesar 95,79% yaitu sebanyak 500 orang atau tercapai sebesar 120 (127,72)%.

Indikator Kinerja Utama 2

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan

pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

IKU 2 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis anggaran Rupiah Murni dan BLU, peserta merupakan masyarakat (Non-ASN dan ASN), Peserta pelatihan telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Pelatihan, serta untuk peserta ASN pelatihan yang diikuti merupakan pelatihan yang tidak diselenggarakan oleh Balai Diklat Aparatur.

Indikator ini diukur dengan akumulasi jumlah masyarakat KP yang lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan.

Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

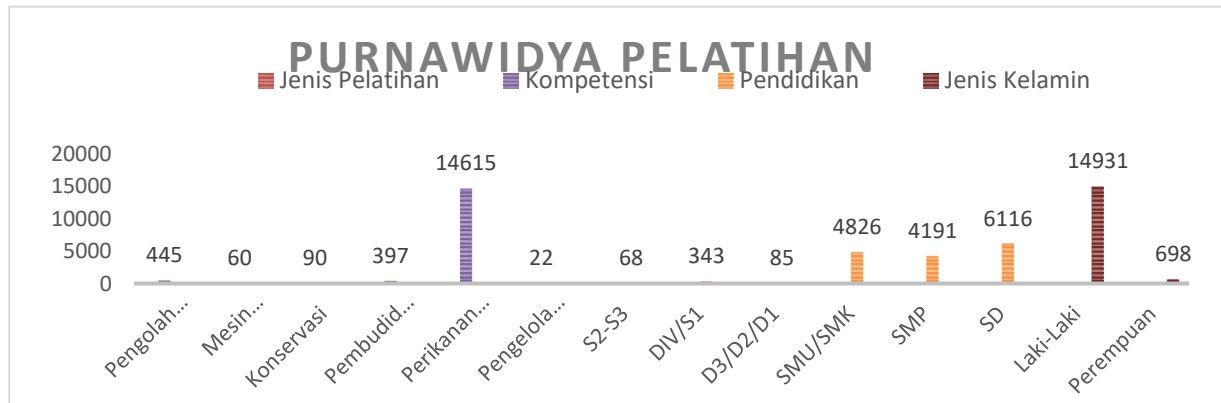
Tabel 9. Capaian IKU 2 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih BPPP Tegal

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IKU 2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
4.247	12.914	17.759	23.321	12.540	15.629	120 (124,63)	-32,98	21.160	73,86

Dari tabel diatas dapat dilihat target Tahun 2025 indikator ini sebanyak 12.540 Orang dan telah terrealisasi capaiannya sebanyak 15.629 orang atau tercapai sebesar 120 (124,63)% dengan proporsi 14.931 orang laki-laki dan 698 orang perempuan, kondisi ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan didominasi peserta laki-laki karena karakteristik sektor kelautan dan perikanan yang masih didominasi oleh pekerjaan berbasis fisik serta peran tradisional laki-laki sebagai pelaku utama usaha terutama pada bidang penangkapan ikan. Sementara itu, peserta perempuan masih terbatas pada bidang budidaya, serta

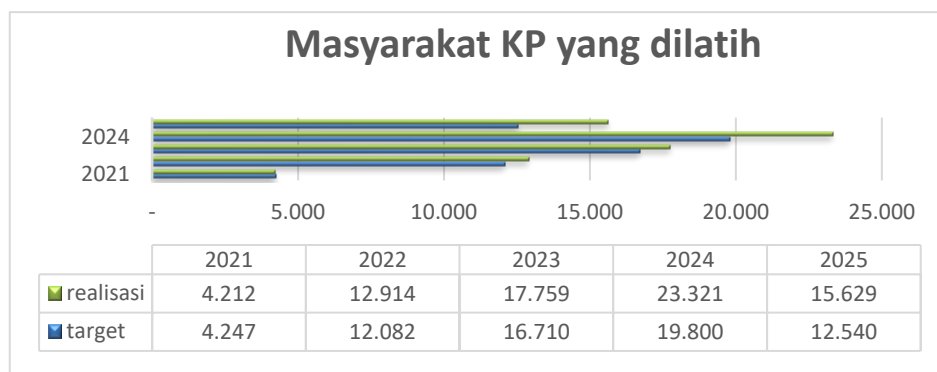
pengolahan dan pemasaran dimana capaian pelatihan yang bersumber dari anggaran RM sebanyak 522 orang serta capaian dari sumber anggaran BLU sebanyak 15.107 orang.

Purnawidya pelatihan masyarakat sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan jenis pelatihan, kompetensi, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6. Grafik Purnawidya Pelatihan Masyarakat berdasarkan Jenis Pelatihan, Kompetensi, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami penurunan sebesar 32,98% hal ini dikarenakan pada Tahun 2025 tidak ada kegiatan aspirasi yang merupakan imbas dari kebijakan efisiensi anggaran. Perbandingan target dan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 7. Perbandingan Capaian IKU 2 dengan tahun sebelumnya

Dari data diatas dapat dilihat pencapaian target pelatihan mulai dari Tahun 2021 ke tahun 2024 mengalami peningkatan karena potensi BPPP Tegal sebagai Badan Layanan Umum dituntut harus terus memenuhi target PNPB yang semakin meningkat dan permintaan dari stakeholder dalam penyelenggaraan pelatihan. Namun pada Tahun 2025

realisasi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada Tahun 2025 tidak ada kegiatan aspirasi yang dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak ada lagi pelatihan aspirasi yang diselenggarakan BPPP Tegal.

Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target Rencana Kegiatan BPPP Tegal 2025-2029 untuk indikator ini telah tercapai sebesar 73,86% dari target sebesar 21.160 orang pada tahun 2029. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 10. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 2 Masyarakat KP dilatih dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	12.540	15.629	120 (124,63)
2	BPPP Medan	430	456	106,05
3	BPPP Banyuwangi	1030	1770	120 (171,84)
4	BPPP Bitung	400	475	118,75
5	BPPP Ambon	400	715	120 (187,75)

Adapun Faktor Penyebab keberhasilan untuk kegiatan ini antara lain:

- Adanya pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP.
- Adanya pelatihan yang dilaksanakan secara blended sehingga memudahkan masyarakat untuk mengikuti.
- Kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun, jika terdapat pergeseran, segera dilakukan koordinasi untuk penyesuaian jadwal pelatihan kembali sehingga pelaksanaan sesuai target yang telah ditetapkan.
- BPPP Tegal telah diapprove sebagai penyelenggara program diklat awak kapal perikanan oleh lembaga approval.
- Tersedianya database penyelenggaraan dan purnawidya pelatihan dengan baik dan terkoordinir.

Efisiensi penggunaan sumberdaya bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat dilakukan oleh widyaiswara/instruktur serta dibantu oleh penyuluh perikanan/penyuluh perikanan bantu BPPP Tegal, selain itu efisiensi sumberdaya dalam anggaran pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan secara *blended* sehingga meminimalisir penganggaran kegiatan.

Adapun kegiatan Penunjang antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) sehingga dapat mengemas kegiatan pelatihan lebih menarik.
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan.
- c. Adanya kerjasama/kemitraan dengan perusahaan/LPK/instansi pemerintah lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan.
- d. Ketercapaian pada RO 2375.SCC.831.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih dimana pada tahun ini tercapai sebanyak 15.629 orang (>120%) dari target 12.540 orang terdiri dari 2 jenis pelatihan yaitu Pelatihan Masyarakat Berbasis “Online Training/Blended” yang telah melaksanakan 21 kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta yang dilatih sebanyak 522 orang dari target 390 orang atau sebesar 133,85% dan Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan dengan peserta sebanyak 15.107 orang dari target sebesar 12.150 orang atau 124,33%.

Indikator Kinerja Utama 3

Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- g. Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor B.2669/SK/BPPP.TGI/KU.320/IV/2025 Tanggal 19 April 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal nomor B. 4549/SK/BRSMBPPP.TGK/KU.320/XI/2022 Tentang penetapan Tarif Layanan BLU BPPP Tegal.

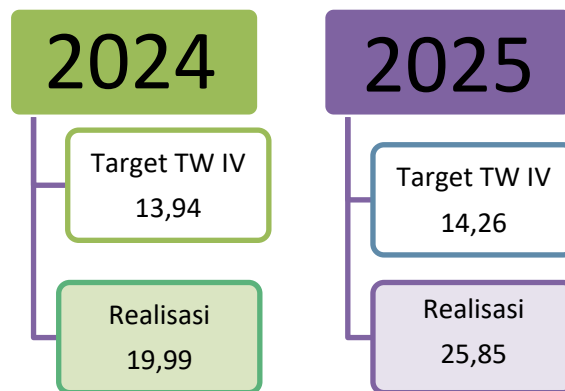
IKU 3 Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal Tahun 2025 dengan target tahunan yang ditetapkan adalah Rp. 14,262.000.000. Adapun capaian sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Capaian IKU 3 Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IKU 3. Nilai PNBPN Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	4,45	9,17	19,99	14,26	25,85	120 (181,28)	29,31	27,10	95,39

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IKU Nilai PNBPN baru muncul di tahun 2022 setelah BPPP Tegal ditetapkan sebagai satker BLU (Badan Layanan Umum) dan realisasi PNBPN terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 realisasi nilai PNBPN satker BPPP Tegal mencapai 9,17 rupiah miliar, kemudian tahun 2023 meningkat realisasinya menjadi 4,56 rupiah miliar dan tahun 2024 meningkat lagi mencapai 19,99 rupiah miliar. Target tahun 2025 indikator nilai PNBPN Satker BPPP Tegal sebesar Rp. 14.262.000.000,- dan telah terrealisasi Rp. 25.847.561.796,- atau sebesar 120 (181,28)% jumlah tersebut termasuk bunga bank dalam rekening penerimaan PNBPN.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami peningkatan sebesar 29,31% seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 8. Perbandingan Capaian PNBPN dengan tahun Sebelumnya

Dari gambar diatas dapat dilihat indikator ini mengalami peningkatan target yang signifikan di Tahun 2025, hal tersebut dikarenakan BPPP Tegal sebagai satker BLU memiliki target yang semakin meningkat setiap tahunnya seiring meningkatnya layanan pelatihan serta pengelolaan aset lainnya pada BPPP Tegal. Jika dibandingkan dengan target rencana kegiatan 2025-2029 tercapai sebesar 95,39% dari target tahun 2029 sebesar 27,10 Rupiah Miliar. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian Triwulan IV IKU 3 Nilai PNBPN dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	14.26	25.85	120 (181.25)
2	BPPP Medan	0.05	0.06	120
3	BPPP Banyuwangi	0.32	0.40	120 (125)
4	BPPP Bitung	0.19	0.23	120 (121,05)
5	BPPP Ambon	0.74	0.78	106,12

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BPPP Tegal memiliki capaian tertinggi dibandingkan satker lain hal ini seiring dengan penetapan target yang lebih tinggi sebagai satker BLU. Namun secara keseluruhan capaian seluruh satker sangat baik karena hampir semua satker mencapai lebih dari 120%

Faktor penunjang keberhasilan indikator antara lain :

- a. Adanya komitmen dalam pemenuhan target PNBPN yang telah disepakati bersama.
- b. Sebagai Satker BLU, BPPP Tegal terus memaksimalkan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam meningkatkan PNBPN.
- c. Peningkatan pelayanan pelatihan melalui pengembangan aplikasi digital

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja :

- a. Melakukan promosi penyelenggaraan pelatihan ke perusahaan dan sekolah
- b. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan pihak luar untuk menghasilkan PNBPN.
- c. Melakukan monitoring PNBPN melalui sistem informasi yang terintegrasi
- d. Meningkatkan optimalisasi aset serta melakukan peremajaan fasilitas yang lebih modern untuk menghasilkan PNBPN.
- e. Ketercapaian PNBPN paling besar didapatkan dari R0 2375.SCC.831.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih (Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan) tercapai sebesar Rp 17,526,966,600,-; kemudian sisanya didapatkan dari Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha sebesar Rp 5,027,752,757,- ; Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp 3,855,000,- ; Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah sebesar Rp 61,140,000,- ; Pendapatan Lain-lain BLU sebesar Rp 164,771,500,-; Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU sebesar Rp 41,135,500,-; Pendapatan Penyediaan Barang sebesar Rp 1,159,093,870,-; Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan sebesar Rp 76,000,000,-; Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 497,704,964,- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah sebesar Rp 84,263,000,- ; Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung sebesar Rp 518,395,378,- ; Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya sebesar Rp 227,550,000,- ; Pendapatan Jasa Pencetakan sebesar Rp 3,750,000,- ; Pendapatan BLU Lainnya dari

Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 6,100,000,- ; Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU sebesar Rp 29,184,500,- ; Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp 416,456,574,- ; dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp 3,442,153,- sehingga total pendapatan sebesar Rp 25,847,561,796,-.

Indikator Kinerja Utama 4

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)

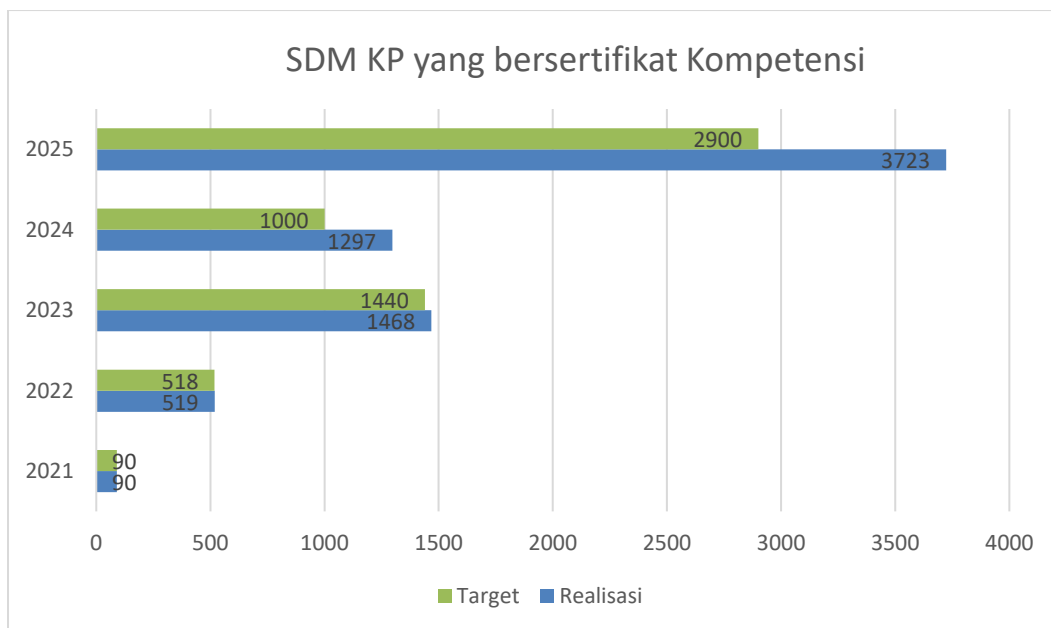
IKU 4 Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya. Pengukuran indikator ini adalah dengan menghitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP Tegal. Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian IKU 4 SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal (orang)

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IKU 4. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
90	519	1.468	1.297	2.900	3.723	120 (128,38)	187,05	-	-

Target Tahunan indikator SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Tegal sebanyak 2.900 Orang telah terrealisasi outputnya sebanyak 3.723 orang atau sebesar 120

(128,38)% dengan bidang kompetensi penangkapan ikan sebanyak 3.665 orang, budidaya 11 orang, pengolahan dan pemasaran 3 orang, Mesin Perikanan 42 orang dan Manajemen 2 orang. Output Capaian indikator ini diperoleh dari peserta Ujian Upgrading SKK 60 Mil ke ANKAPIN/ATKAPIN III, Uji Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan, Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan Tingkat 1, dan Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan Tingkat 2. Peserta yang mengikuti ujian ini dan dinyatakan lulus dibuktikan dengan sertifikat. Untuk sertifikat yang belum terbit dikeluarkan surat keterangan lulus oleh Kepala Balai dilampirkan Berita Acara pelaksanaan ujian. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target Rencana Kegiatan 2029 dikarenakan pada Renstra BPPSDM tahun 2025 - 2029 RO Serkom (2375.DCC.431.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi) sudah tidak ada karena masuk ke dalam RO Pelatihan 2375.SCC.831.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih sehingga tidak ada target pada tahun 2029. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator ini mengalami peningkatan realisasi sebesar 187,05%, perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 9. Perbandingan Capaian SDM KP yang bersertifikasi kompetensi

Dari data diatas dapat dilihat peningkatan target dan capaian indikator ini yang disebabkan oleh peningkatan layanan yang mendukung BPPP Tegal sebagai satker badan

layanan umum. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan.

Faktor keberhasilan untuk indikator ini adalah tersedianya sarana dan prasarana pelatihan, asessor yang tersertifikasi dan berkompeten serta status BPPP Tegal sebagai lembaga pelatihan yang tersertifikasi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengikuti uji kompetensi di BPPP Tegal. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dari pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh widyaiswara dan instruktur BPPP Tegal sebagai pelatih/asesor.

Adapun kegiatan penunjang untuk indikator ini adalah peningkatan sarana prasarana pelatihan dengan melakukan re-akreditasi lembaga, mengupgrade kemampuan assesor dan pelatih, sosialisasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial serta kerjasama dengan instansi lain sebagai penyelenggara ujikom, serta ketercapaian RO 2375.DCC.431.Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi dari target 2.900 orang tercapai sebesar 3.723 orang yang terdiri dari peserta Ujian Upgrading SKK 60 Mil ke ANKAPIN/ATKAPIN III sebanyak 2.209 orang, peserta Uji Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan sebanyak 161 orang, peserta Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan Tingkat 1 sebanyak 452 orang dan peserta Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan Tingkat 2 sebanyak 901 orang.

Indikator Kinerja Utama 5

Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)

IKU 5 Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal didefinisikan sebagai Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang dalam dokumen perencanaan kerja Satker. IKU 5 diukur dengan menghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Capaian IKU 5 Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IKU 5. Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
2	1	2	3	2	2	100	-33,33	2	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi sarana pelatihan KP di BPPP Tegal pada tahun 2021 sejumlah 2 unit, tahun 2022 sejumlah 1 unit, tahun 2023 sejumlah 2 unit, tahun 2024 sejumlah 3 unit. Pada Tahun 2025 target indikator ini adalah 2 Unit dan telah tercapai sebanyak 2 Unit atau sebesar 100%, adapun pagu anggaran sarana bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan sebesar Rp 1.866.435.000,- dengan realisasi sampai bulan Desember sebesar Rp 1.864.403.066,- dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pengadaan Sarana Kelengkapan Asrama Bahari Residence III dengan Nilai Rp 389.876.400,-
2. Pengadaan Sarana Mesin Cold Storage dengan Nilai Rp 59.719.998,-
3. Pengadaan Sarana Perlengkapan Navigasi dan Mesin dengan Nilai Rp 75.100.000,-
4. Pengadaan Sarana Layanan Pelatihan (Kursi) dengan Nilai Rp 65.859.002,-
5. Pengadaan Sarana Layanan Pelatihan (TV, Mebelair, Kendaraan dll) dengan Nilai Rp 1.096.471.200,-
6. Pengadaan Sarana Kelengkapan Asrama Bahari Residence 3 dengan Nilai Rp 177.376.446,-

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami penurunan sebesar 33,33%, sedangkan jika dibandingkan dengan target rencana kegiatan 2025-2029 BPPP Tegal indikator ini telah tercapai sebesar 100%.

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, iku ini juga belum bisa

dibandingkan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM karena IKU Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya hanya ada di BPPP Tegal.

Tabel 15. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 5 Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	2	2	100
2	Politeknik KP Karawang	1	2	120

Dari tabel di atas menunjukkan perbandingan capaian indikator ini dengan unit kerja lain dapat dilihat secara keseluruhan capaian seluruh satker sudah cukup baik karena telah mencapai target yang ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan kegiatan ini adalah adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran dan program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengadaan barang yang sesuai jadwal dan dapat diselesaikan tepat waktu serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten. Analisis atas efisiensi sumberdaya terdapat efisiensi sumberdaya manusia dalam mencapai indikator ini yaitu tersedianya tim pengadaan barang BPPP Tegal yang telah tersertifikasi. Adapun Kegiatan penunjang IKU ini adalah melaksanakan pengadaan barang yang tersedia pada layanan E-Katalog sehingga memudahkan untuk menyesuaikan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan dilaksanakan oleh LPSE serta ketercapaian RO 2375.RAL.711.Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 2.516.432.000,- namun terdapat efisiensi sebesar Rp. 649.997.000,- sedangkan realisasi sampai dengan bulan Desember sebesar Rp 1.864.403.066,- dengan total 2 Unit.

Indikator Kinerja Utama 6

Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)

IKU 6 Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal merupakan Peningkatan kapasitas Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Puslatluh KP. Pengadaan fisik dan nonfisik yang diadakan sesuai dengan yang sudah disetujui dan tertuang

dalam dokumen perencanaan kerja Satker. IKU 6 diukur dengan menghitung Jumlah Prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 156. Capaian IKU Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)

SK. 1 Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IKU 6. Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
1	1	1	4	2	2	100	-50,00	2	100,00

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi prasarana pelatihan KP di BPPP Tegal pada tahun 2022 sejumlah 1 unit, tahun 2023 sejumlah 1 unit, tahun 2024 sejumlah 4 unit. Pada Tahun 2025 target indikator ini adalah 2 Unit dan telah tercapai sebanyak 2 Unit atau sebesar 100%, adapun pagu anggaran prasarana bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan sebesar Rp 982.000.000,- dengan realisasi sampai bulan Desember sebesar Rp 889.856.210,- dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Mess dengan Nilai Rp 39.615.900,-
2. Pekerjaan Instalasi Rumah Pompa, Kolam Penampungan Air Selokan, Pompa, Sistem Drainase Lingkungan Asrama Pelatihan Eks SUPM Tegal dengan Nilai Rp 197.047.500,-
3. Pekerjaan Pemasangan Penangkal Petir Elektrostatis dengan Nilai Rp 139.335.025,-
4. Pekerjaan Paving Halaman Asrama Bahari Residence III dengan Nilai Rp 167.875.400,-
5. Pekerjaan Pemasangan Kanopi, Railing, List dan Plint Asrama Bahari Residence III dengan Nilai Rp 251.341.185,-
6. Pekerjaan Rehab Bangunan Aula dengan Nilai Rp 94.641.200,-

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami penurunan sebesar 50%, sedangkan jika dibandingkan dengan target rencana kegiatan 2025-2029 BPPP Tegal indikator ini telah tercapai sebesar 100%.

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, iku ini juga belum bias dibandingkan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM karena IKU Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya hanya ada di BPPP Tegal.

Tabel 167. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 6 Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	2	2	100
2	Politeknik KP Karawang	1	1	100

Dari tabel di atas menunjukkan perbandingan capaian indikator ini dengan unit kerja lain dapat dilihat bahwa BPPP Tegal mempunyai target yang lebih tinggi dari Politeknik KP Karawang namun keduanya dapat mencapai target yang ditetapkan.

Faktor penyebab keberhasilan kegiatan ini adalah Adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran dan program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengadaan barang yang sesuai jadwal dan dapat diselesaikan tepat waktu serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten. Analisis atas efisiensi sumberdaya terdapat efisiensi sumberdaya manusia dalam mencapai indikator ini yaitu tersedianya tim pengadaan barang BPPP Tegal yang telah tersertifikasi. Adapun Kegiatan penunjang IKU ini adalah melaksanakan pengadaan barang yang tersedia pada layanan E-Katalog sehingga memudahkan untuk menyesuaikan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan dilaksanakan oleh LPSE dan adanya kegiatan pendampingan oleh Inspektorat dan Sekretariat BRSDM dalam setiap kegiatan pengadaan prasarana Balai serta ketercapaian RO 2375.RBQ.721. Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebesar Rp 5.454.121.000,- namun terdapat efisiensi sebesar Rp. 4.472.121.000,- sedangkan realisasi sampai dengan bulan Desember sebesar Rp 889.856.210,- dengan total 2 Unit.

SASARAN KEGIATAN 2

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, BPPP Tegal mendukung tatakelola pemerintah yang baik, dengan melakukan pendokumentasian sebagai bukti pelaksanaan dan pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan. Untuk mewujudkan hal tersebut didukung dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 7

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)

IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Merupakan Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

IKU 7 diukur dengan formulasi sebagai berikut:

- A. Jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan
- C. Persentase layanan dukungan manajemen internal

Dokumen dukung layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Tahun 2025

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Realisasi Dokumen
1	Perjanjian Kinerja	1	1
2	Manual IKU	1	1
3	Laporan Kinerja		
	a. Triwulan 1	1	1
	b. Triwulan 2	1	1
	c. Triwulan 3	1	1
	d. Tahunan (Tahun 2024)	1	1
4	Dokumen Perencanaan Anggaran		
	a. DIPA	1	1
	a. RKAKL	1	1
5	Rencana Kerja Tahunan	1	1
6	Laporan Survey Kepuasan Pelanggan		
	a. Triwulan 1	1	1
	b. Triwulan 2	1	1
	c. Triwulan 3	1	1
	d. Tahunan (Tahun 2024)	1	1
7	Laporan Keuangan		
	a. Semester I	1	1
	b. Semester II (Tahunan/Tahun 2024)	1	1
8	Matrik Laporan SPIP		
	a. Triwulan 1	1	1
	b. Triwulan 2	1	1
	c. Triwulan 3	1	1
	d. Tahunan (Tahun 2024)	1	1
9	Matrik Laporan Manajemen Risiko (MR)		
	a. Triwulan 1	1	1
	b. Triwulan 2	1	1
	c. Triwulan 3	1	1
	d. Tahunan (Tahun 2024)	1	1
10	Laporan Tahunan (Program dan Kegiatan)	1	1
11	Prinscreen Aplikasi (Triwulan)		
	a. Kinerjaku	4	4
	b. Monev Keuangan	4	4
	c. Bappenas E-Monev	4	4

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Realisasi Dokumen
	d. OMSPAN	4	4
Jumlah Dokumen		40	40

Adapun capaian IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Capaian IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)

SK. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKU 7. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
100	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100,00

A. Capaian sampai dengan Tahun 2025

Indikator persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal pada Tahun 2025 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%.

Adapun daftar capaian dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 17. Daftar dokumen layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal Tahun 2025

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Realisasi Dokumen	Link Dokumen
1	Perjanjian Kinerja	1	1	1. Perjanjian Kinerja
2	Manual IKU	1	1	2. Manual IKU
3	Laporan Kinerja			
	a. Triwulan 1	1	1	3. Laporan Kinerja
	b. Triwulan 2	1	1	3. Laporan Kinerja
	c. Triwulan 3	1	1	3. Laporan Kinerja
	d. Tahunan (Tahun 2024)	1	1	3. Laporan Kinerja
4	Dokumen Perencanaan Anggaran			
	a. DIPA	1	1	a. DIPA
	b. RKAKL	1	1	b. RKAKL

No	Nama Dokumen	Jumlah Dokumen	Realisasi Dokumen	Link Dokumen
5	Rencana Kerja Tahunan	1	1	5. Rencana Kerja Tahunan
6	Laporan Survey Kepuasan Pelanggan			
	a. Triwulan 1	1	1	6. Laporan Survey Kepuasan Pelanggan
	b. Triwulan 2	1	1	6. Laporan Survey Kepuasan Pelanggan
	c. Triwulan 3	1	1	6. Laporan Survey Kepuasan Pelanggan
	d. Tahunan (Tahun 2024)	1	1	6. Laporan Survey Kepuasan Pelanggan
7	Laporan Keuangan			
	a. Semester I	1	1	7. Laporan Keuangan
	b. Semester II (Tahun 2024)	1	1	7. Laporan Keuangan
8	Matrik Laporan SPIP			
	a. Triwulan 1	1	1	8. Matrik Laporan SPIP
	b. Triwulan 2	1	1	8. Matrik Laporan SPIP
	c. Triwulan 3	1	1	8. Matrik Laporan SPIP
	d. Tahunan (Tahun 2024)	1	1	8. Matrik Laporan SPIP
9	Matrik Laporan Manajemen Risiko (MR)			
	a. Triwulan 1	1	1	9. Matrik Laporan MR
	b. Triwulan 2	1	1	9. Matrik Laporan MR
	c. Triwulan 3	1	1	9. Matrik Laporan MR
	d. Tahunan (Tahun 2024)	1	1	9. Matrik Laporan MR
10	Laporan Tahunan (Program dan Kegiatan)	1	1	10. Laporan Tahunan
11	Prinscreen Aplikasi (Triwulan)			
	a. Kinerjaku	4	4	11. Prinscreen Aplikasi
	b. Monev Kemenkeu	4	4	11. Prinscreen Aplikasi
	c. Bappenas E-Monev	4	4	11. Prinscreen Aplikasi
	d. OMSPAN	4	4	11. Prinscreen Aplikasi
Jumlah Dokumen		40	40	
%			100,00	

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan tahun sebelumnya indikator ini memiliki dokumen capaian lebih sedikit karena beberapa dokumen sudah tidak relevan dengan tahun ini, yaitu terdiri dari 40 dokumen atau tercapai 100% dari target tahunan, sedangkan tahun sebelumnya 53 dokumen dengan capaian 100% dari target tahunan sehingga tidak ada peningkatan/penurunan capaian pada indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Kegiatan BPPP Tegal

Jika dibandingkan dengan target rencana kegiatan BPPP Tegal 2025-2029 indikator ini telah tercapai sebesar 100% dari target rencana kegiatan tahun 2029 sebesar 100%.

D. Faktor penyebab Keberhasilan

Adanya SOP dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan yang merupakan dokumen yang harus ada dimiliki dalam dukungan manajemen internal.

E. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi sumberdaya bahwa dalam pencapaian kegiatan ini didukung oleh SDM BPPP Tegal yang telah mengikuti bimtek/diklat/pelatihan sesuai bidang dan didukung dengan sistem pelaporan melalui aplikasi.

F. Kegiatan Penunjang

Melakukan rapat monitoring dan evaluasi dalam rangka pemenuhan data dukung dan penyusunan laporan/ dokumen dukungan internal serta ketercapaian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dari anggaran sebesar Rp 15,910,624,000,- dengan realisasi Rp 14,893,615,108,- dengan target 40 dokumen dan telah tercapai 40 dokumen (100%)

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU 7 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	100	100	100
2	BPPP Medan	100	100	100
3	BPPP Banyuwangi	100	100	100
4	BPPP Bitung	100	100	100
5	BPPP Ambon	100	100	100

Indikator Kinerja Utama 8

Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)

IKU 20 Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa variabel pembentuk dan bobot sebagai berikut:

- a. **Kualifikasi (25%)** dihitung dari kondisi pendidikan terkini dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. **Kompetensi (40%)** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, misalkan Pejabat Eselon IV Tidak Pernah melaksanakan Diklatpim Tingkat IV maka pegawai tersebut nilainya 0;
 - Diklat Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar dihitung sejak 5 tahun terakhir, apabila dalam kurun waktu tersebut Pernah melaksanakan diklat dan seminar maka nilai

kompetensi pegawai tersebut yaitu 15 dan 10 untuk Struktural dan Jabfung serta 22,5 dan 17,5 untuk staf ;

- c. **Kinerja (30%)** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP dan di kolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP);
- d. **Disiplin (5%)** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Pengukuran komponen kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai meliputi pendidikan S3, S2, S1/D4, D3, D1, SLTA, SLTP dan SD. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, meliputi Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Konferensi/setara. Untuk komponen kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Sedangkan komponen disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami seperti: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, ringan maupun berat.

Pengolahan atas hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur yang dapat dilihat melalui website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025>. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesional ASN dengan nilai antara sebagai berikut:

Tabel 18. Kategori Nilai Indeks Profesionalitas ASN

No	Nilai	Kategori	
1	91 – 100	Sangat Tinggi	sangat profesional
2	81 – 90	Tinggi	cenderung profesional
3	71 – 80	Sedang	rentan tidak profesional
4	61 – 70	Rendah	cenderung tidak profesional
5	0 – 60	Sangat Rendah	sangat tidak profesional

Capaian IKU 8 Indikator Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Capaian IKU 8 Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)

SK. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKU 8. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
82,32	81,04	82,65	82,73	83	85,04	102,46	2,79	83	102,46

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian realisasi indeks profesionalitas ASN BPPP Tegal tahun 2021 sebesar 82,32; tahun 2022 sebesar 81,04; tahun 2023 sebesar 82,65; dan tahun 2024 sebesar 82,73. Berdasarkan surat Plt. Sekretaris BPPSDM nomor 62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang penyampaian hasil pengukuran IP ASN Tahun 2025 lingkup BPPSDM, dari surat tersebut dapat dilihat capaian indikator ini adalah sebesar 85,04 atau tercapai sebesar 102,46% dari target yang ditetapkan sebesar 83. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya indikator ini mengalami kenaikan sebesar 2,79 sedangkan jika dibandingkan dengan target Rencana Kegiatan 2025-2029 indikator ini telah tercapai sebesar 102,46 dari target 2029 sebesar 83. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU 8 Indeks Profesionalitas ASN dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	83	85,04	102,46
2	BPPP Medan	83	85,17	102,61
3	BPPP Banyuwangi	83	85,43	102,93
4	BPPP Bitung	83	83,82	100,99
5	BPPP Ambon	83	84,19	101,43

Faktor penyebab keberhasilan indikator ini adalah adanya upaya peningkatan kompetensi ASN BPPP Tegal didukung dengan keikutsertaan pada diklat dan pelatihan baik dari internal BPPP Tegal atau dari pihak luar yang mendukung tugas pokok dan fungsi, kemudian pelaksanaan pelatihan/seminar/diklat yang dilaksanakan secara online/ gratis sehingga mudah diakses oleh pegawai. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada indikator ini adalah efisiensi penggunaan sumberdaya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN BPPP Tegal. Adapun kegiatan penunjang untuk mencapai indikator ini adalah adanya penyampaian informasi-informasi terkait webinar, pelatihan, seminar melalui whatsapp Group dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan menghimbau seluruh pegawai lingkup BPPP Tegal yang telah mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek/seminar dll untuk melakukan upload dokumen bukti mengikuti kegiatan pelatihan tersebut melalui aplikasi My ASN sebagai bukti penunjang nilai peningkatan kompetensi pegawai serta ketercapaian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dari anggaran sebesar Rp 15,910,624,000,- dengan realisasi Rp 14,893,615,108,- dengan target 40 dokumen dan telah tercapai 40 dokumen (100%)

Indikator Kinerja Utama 9

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 (Triwulan IV Tahun 2025).

Reviu dan Evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran) ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Tabel 21. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)

SK. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKU 9. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	100	100	100	85	100	118	0,00	89	112,36

Berdasarkan surat dari Plt. Sekertaris BPPSDM Nomor 94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 Perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2025 dari surat tersebut dapat dilihat capaian indikator ini telah tercapai 100% dari target tahunan sebesar 85. Indikator ini diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan Itjen yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker BPPSDMKP. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 22. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	85	100	118
2	BPPP Medan	85	85	100
3	BPPP Banyuwangi	85	85	100

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
4	BPPP Bitung	85	85	100
5	BPPP Ambon	85	85	100

Analisis dan Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah pengukuran dilakukan oleh tim inspektorat jenderal KKP yang telah bersertifikat dan berpengalaman dibidang pengawasan. Faktor penyebab keberhasilan kegiatan ini adalah adanya komitmen pimpinan dan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen, meminimalisir temuan dengan penyelenggaraan administrasi keuangan dan perbendaharaan yang baik, dan adanya pengawasan internal yang efektif sehingga temuan dapat diantisipasi lebih awal dan memberikan rekomendasi masukan yang relevan bagi peningkatan kinerja. Adapun kegiatan penunjang kegiatan ini adalah melakukan kompilasi berkas/dokumen tindaklanjut sesuai rekomendasi Tim Auditor Inspektorat Jenderal, melakukan penginputan/mengupload dokumen tindaklanjut ke dalam aplikasi SIDAK, dan melakukan koordinasi sekaligus penyampaian dokumen Tindak lanjut yang sudah di upload dalam aplikasi SIDAK kepada Tim Auditor Inspektorat Jenderal KP, kemudian melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu serta ketercapaian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dari anggaran sebesar Rp 15,910,624,000,- dengan realisasi Rp 14,893,615,108,- dengan target 40 dokumen dan telah tercapai 40 dokumen (100%).

Indikator Kinerja Utama 10

Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (nilai)

Indikator Kinerja Utama Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator baru pada Tahun 2025, pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Perhitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

- 1) Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
- 2) Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%;
- 3) Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
- 4) Evaluasi kinerja dengan bobot 25%;

Capaian indikator penilaian mandiri SAKIP BPPP Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal

SK. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKU 10. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	81,2	83,90	80	83,50	104,38	-0,48	83	100,60

Berdasarkan surat dari Sekretaris BPPSDM nomor B.4485/BPPSDM.1/RC.510/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Hasil penilaian Mandiri SAKIP Level 2 lingkup BPPSDM melampirkan perolehan nilai capaian indikator ini untuk BPPP Tegal adalah 83,50 atau 104,38% dari target yang ditetapkan sebesar 80. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator ini menurun sebesar 0,48% kemudian jika dibandingkan dengan target Rencana Kegiatan 2025-2029 tercapai 100,60% dari target 83.

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	80	83,50	104,38
2	BPPP Medan	80	85	104,25
3	BPPP Banyuwangi	80	83,15	103,94
4	BPPP Bitung	80	83,15	103,94
5	BPPP Ambon	80	83,50	104,38

Faktor penyebab keberhasilan indikator ini adalah adanya Pedoman SAKIP serta penilaian melalui aplikasi dan tersedianya data dukung sampai dengan 5 tahun.

Adapun penunjang kegiatan ini adalah adanya upaya baru dalam perencanaan/pengukuran pelaporan kinerja, melakukan pendokumentasian dengan baik dan upload data dukung sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dan pendampingan implementasi SAKIP oleh sekretariat BPPSDM serta ketercapaian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dari anggaran sebesar Rp 15,910,624,000,- dengan realisasi Rp 14,893,615,108,- dengan target 40 dokumen dan telah tercapai 40 dokumen (100%)

Indikator Kinerja Utama 11

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN satker Pusat Pelatihan Kelautan dan perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Formula

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
- Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
- Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
- Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

Ini merupakan IKU baru di Tahun 2025. Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal

SK. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKU 11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	80	97,50	120 (121,88)	-	84	116,07

Berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris BPPSDM nomor 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025” melampirkan perolehan nilai capaian indikator ini untuk BPPP Tegal adalah 97,50 atau 120(121,88)% dari target yang ditetapkan sebesar 80. Jika dibandingkan dengan target Rencana Kegiatan 2025-2029 tercapai 116,07% dari target 84.

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	80	97,50	120(121,88)
2	BPPP Medan	80	97,50	120(121,88)
3	BPPP Banyuwangi	80	100	125
4	BPPP Bitung	80	95	118,75
5	BPPP Ambon	80	80	100

Faktor penyebab keberhasilan indikator ini adalah adanya pedoman penilaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN yang tersaji dalam LKE, memiliki operator pengelola BMN yang handal dan berkompeten, tertib administrasi pengelolaan BMN sehingga dapat memenuhi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk penilaian/pengukuran . Adapun penunjang kegiatan ini adalah telah menyusun dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025 dan pemanfaatannya, telah menyelaraskan pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025, Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang, Tersedianya usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian dalam penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024, Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu, dan telah menyusun dan menyampaikan RKBMN tahun 2027 serta ketercapaian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dari anggaran sebesar Rp 15,910,624,000,- dengan realisasi Rp 14,893,615,108,- dengan target 40 dokumen dan telah tercapai 40 dokumen (100%)

Indikator Kinerja Utama 12

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)

Indikator Kinerja Utama Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal merupakan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

Persentase RU PBJ yang diumumkan = (Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP)/(Pagu Pengadaan Barang/Jasa) $\times$ 100%

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Capaian indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Capaian IKU 12 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)

SK. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKU 12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	80	100,00	120 (125)	-	84	119,05

Berdasarkan tabel diatas hasil capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal telah tercapai 100% dari target tahunan sebesar 80. Indikator ini diperoleh berdasarkan Surat Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan IV TA. 2025 dengan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor: 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 13 Januari 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025 yang dihitung berdasarkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 28. Perbandingan (benchmarking) Capaian Triwulan IV IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	80	100	120 (125)
2	BPPP Medan	80	100	120 (125)
3	BPPP Banyuwangi	80	100	120 (125)
4	BPPP Bitung	80	100	120 (125)
5	BPPP Ambon	80	100	120 (125)

Analisis dan Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini adalah pengukuran dilakukan oleh tim Biro Umum dan PBJ yang telah bersertifikat dan berpengalaman dibidang pengadaan barang jasa. Faktor penyebab keberhasilan kegiatan ini adalah adanya komitmen pimpinan dan penanggung jawab kegiatan untuk mengupload pengumuman dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Adapun kegiatan penunjang kegiatan ini adalah melakukan penginputan/mengupload dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan tepat waktu serta ketercapaian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dari anggaran sebesar Rp 15,910,624,000,- dengan realisasi Rp 14,893,615,108,- dengan target 40 dokumen dan telah tercapai 40 dokumen (100%)

Indikator Kinerja Utama 13

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan

Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025

Level 2 (Satker) 71,50

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA > 80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA > 60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA > 50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	Capaian RO	75
	Penggunaan SBK	10
	Efisiensi SBK	15
Efisiensi (25)		

a. Efektivitas

1) Capaian RO

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker
RVRO_i : Realisasi Volume RO i
TVRO_i : Target Volume RO i
n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja
Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK
n : Jumlah RO SBK

Formula pengukuran :

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

- NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO : Capaian RO
 $Penggunaan_{SBK}$: Penggunaan SBK
 $NE_{Alokasi}$: Nilai Efisiensi Alokasi
 W_{CRO} : Bobot Capaian RO
 $WPenggunaan_{SBK}$: Bobot Penggunaan SBK
 $WE_{Alokasi}$: Bobot Efisiensi Alokasi

IKU Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPP Tegal di targetkan sebesar 71 dengan priode pengukuran secara tahunan melalui aplikasi monev.kemenkeu.go.id Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal

SK. 2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKU 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	100	71,5	100,00	120 (139,86)	0,00	82,50	121,21

Berdasarkan dashboard monev.kemenkeu.go.id menampilkan data capaian indikator ini untuk BPPP Tegal sebesar 100 atau 120 (139,86). Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun renstra karena merupakan indikator baru pada tahun ini. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 30. Perbandingan (benchmarking) Capaian IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	71,50	100	120 (139,86)
2	BPPP Medan	71,50	100	120 (139,86)
3	BPPP Banyuwangi	71,50	100	120 (139,86)
4	BPPP Bitung	71,50	100	120 (139,86)
5	BPPP Ambon	71,50	100	120 (139,86)

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator ini dengan unit kerja sejenis dimana capaian realisasi BPPP Tegal sama dengan balai lainnya yaitu Medan, Banyuwangi, Bitung dan Ambon.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya aplikasi monev.kemenkeu.go.id yang merupakan bagian dari Nilai kinerja anggaran BPPP Tegal dan pemahaman yang cukup baik terhadap komponen dan indikator dari penilaian perencanaan anggaran serta komitmen untuk disiplin dalam pelaksanaan anggaran. Adapun kegiatan penunjang IKU ini adalah melakukan pengisian manual Indikator Kinerja Program dan realisasi capaian Indikator Kinerja Program pada Aplikasi SAKTI secara tepat waktu, melakukan pemantauan pengisian capaian output pada Aplikasi SAKTI secara berkala dan tepat waktu serta adanya pendampingan tim aplikasi E-Monev BPPSDM serta pemantauan secara berkala terhadap capaian nilai NKPA, melalui input capaian dan komponen yang menjadi penilaian pada aplikasi monev.kemenkeu.go.id serta ketercapaian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dari anggaran sebesar

Rp 15,910,624,000,- dengan realisasi Rp 14,893,615,108,- dengan target 40 dokumen dan telah tercapai 40 dokumen (100%)

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Salah satu tujuan BPPSDMKP dalam mendukung visi Kementerian adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal.

BPPSDMP KP sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP. Untuk mewujudkan tujuan tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama 14

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok)

IKU 14 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Tegal merupakan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat di wilayahnya.

Indikator kinerja kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Tegal diukur dengan menghitung jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung KP yang telah disuluh yang disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Kepala Satminkal Penyuluhan. Target IKU 14 pada Tahun 2025 adalah sebanyak 50 kelompok yang disuluh di BPPP Tegal sebagaimana data ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 31. Capaian IKU 14 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Tegal (Kelompok)

SK. 3 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IKU 14. Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)									
Realisasi Tahun Sebelumnya 2021-2024				2025				Rencana Kegiatan 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
6111	6319	6400	6400	50	50	100	-99,22	53.000	0,09

Dari tabel diatas dapat dilihat indikator kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Tegal di targetkan pada Tahun 2025 sebanyak 50 kelompok dan telah tercapai sebanyak 50 kelompok atau sebesar 100%. Dengan kriteria sebanyak 14 kelompok pemula, 11 kelompok lanjutan dan 25 kelompok madya. Dengan jumlah bidang usaha sebanyak 10 kelompok penangkapan ikan, 15 kelompok budidaya perikanan, 25 kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan proporsi 30 orang laki-laki dan 20 orang perempuan, kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi gender dalam kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dominasi peserta laki-laki dapat dipengaruhi oleh karakteristik sektor kelautan dan perikanan yang masih didominasi oleh pekerjaan berbasis fisik serta peran tradisional laki-laki sebagai pelaku utama usaha. Sementara itu, rendahnya keterlibatan perempuan mengindikasikan masih terbatasnya akses, kesempatan, atau peran perempuan dalam kegiatan penyuluhan, khususnya pada tahapan produksi dan pengambilan keputusan.

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh BPPP Tegal dengan tahun sebelumnya indikator ini mengalami penurunan atau dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10. Perbandingan Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh dengan tahun sebelumnya

Dari gambar diatas dapat dilihat target dan realisasi kelompok disuluh di BPPP Tegal mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena adanya peralihan penyuluh PNS dan PPPK ke satminkal lain (BRBATPP Bogor dan BPPP Banyuwangi) sehingga tersisa capaian kelompok yang disuluh dari 5 (lima) penyuluh PPPK (kab tegal dan kota tegal). Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Balai Tahun 2025-2029 telah tercapai sebesar 0,09% dari jumlah 53.000 kelompok pada tahun 2029. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi sepadan, maka perbandingan (*benchmarking*) dilakukan dengan unit kerja sejenis yaitu BPPP lingkup BPPSDM dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 34. Perbandingan (*benchmarking*) Capaian IKU Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang disuluh dengan unit kerja sejenis

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	50	50	100
2	BPPP Medan	3.880	4.598	118,51
3	BPPP Banyuwangi	5.090	6.220	120 (122,20)
4	BPPP Bitung	2.530	3.000	118,58

No	Satminkal	Target	Realisasi	% Capaian
5	BPPP Ambon	2.500	2.600	104

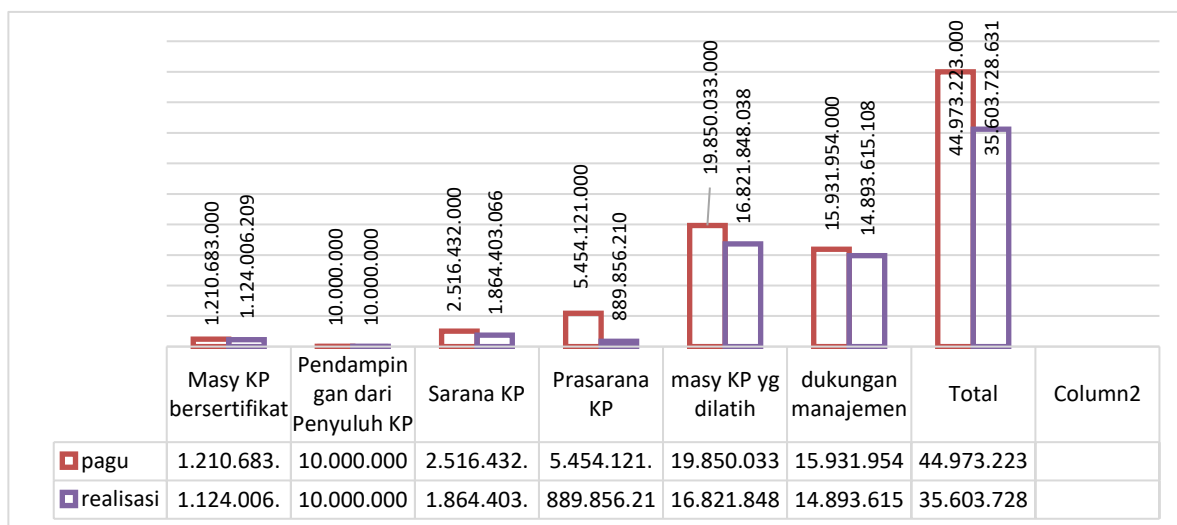
Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian indikator ini dengan unit kerja sejenis. Adanya peralihan penyuluh PNS ke satminkal lain, menjadikan BPPP Tegal hanya memiliki penyuluh bantu atau pppk dengan jumlah yang lebih sedikit, sehingga memiliki target dan output lebih kecil dibandingkan balai lain.

Faktor Keberhasilan untuk indikator ini adalah adanya Peraturan Kepala BPPSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia dalam kegiatan ini yaitu penyuluhan dilakukan oleh penyuluh perikanan dan penyuluh perikanan bantu yang ditempatkan pada lokasi masing-masing, sehingga kegiatan penyuluhan lebih efektif dan efisien.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan IKU ini adalah melaksanakan koordinasi antara penyuluh perikanan/penyuluh perikanan bantu untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok binaan serta memfasilitasi kelompok dalam mendapatkan akses permodalan, akses pasar, akses iptek dan meningkatkan PKS kelompok melalui sosialisasi baik peraturan atau teknologi informasi terkini dibidang perikanan serta ketercapaian RO 7020.QDD.646.Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan dari anggaran sebesar Rp 10.000.000,- terrealisasi sebesar Rp 10.000.000,- dengan output 50 kelompok atau tercapai 100%

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran awal yang dialokasikan kepada BPPP Tegal Tahun 2025 adalah sebesar Rp 37.153.704.000,- kemudian direvisi menjadi 44.973.223.000,- dengan anggaran blokir sebesar 7.021.064.000 sehingga pagu aktif sebesar Rp 37.952.159.000,- dan telah terrealisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 35,603,728,631,- atau 93,81%. Adapun realisasi per output anggaran Tahun 2025 BPPP Tegal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11. Realisasi per output anggaran BPPP Tegal Tahun 2025

Secara umum kinerja BPPP Tegal pada Tahun 2025 telah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi anggaran yang mencapai 93,81% dari pagu aktif.

Adapun pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Tegal dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
Belanja Pegawai	12,182,325,000	11,211,611,426	92.03
Belanja Barang	22,921,399,000	21,637,857,929	94,40
Belanja Modal	2,848,435,000	2,754,259,276	96,69
TOTAL	37.952.159.000	35,603,728,631	93,81

Tabel 326. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
				(Rp)	(Rp)	
Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	120	18.008.087.000	16.821.848.038	93,41
	2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)				
	3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)				
	4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	120	1.210.683.000	1.124.006.209	92,84
	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	100	1.866.435.000	1.864.403.066	99,89
	6	Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	100	982.000.000	889.856.210	90,62
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	112,68	15.874.954.000	14.893.615.108	93,82
	8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (Indeks)				
	9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk				

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
				(Rp)	(Rp)	
		perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)				
	10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)				
	11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)				
	12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)				
	13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)				
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok)	100	10.000.000	10.000.000	100,00
TOTAL PAGU			109,41	37.952.159.000	35.603.728.631	93,81

3.3. Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan

kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi smart DJA. Perhitungan efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 337. Perhitungan Efisiensi Anggaran BPPP Tegal Tahun 2025

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Efisiensi
				(Rp)	(Rp)		
Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Tersekap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	120	18.008.087.000	16.821.848.038	93,41	26,59
	2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)					
	3	Nilai PNBSP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)					
	4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	120	1.210.683.000	1.124.006.209	92,84	27,16
	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	100	1.866.435.000	1.864.403.066	99,89	0,11

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Efisiensi
				(Rp)	(Rp)		
	6	Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	100	982.000.000	889.856.210	90,62	9,38
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	112,68	15.874.954.000	14.893.615.108	93,82	18,86
	8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (Indeks)					
	9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)					
	10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai)					
	11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)					
	12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)					
	13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)					
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok)	100	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00
	TOTAL PAGU		109,41	37.952.159.000	35.603.728.631	93,81	15,60

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa skor kinerja BPPP Tegal Tahun 2025 adalah sebesar 109,41, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 93,81%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 15,60% yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja.

Efisiensi anggaran BPPP Tegal memperoleh skor +15,60. menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan pada level plus. Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Realisasi anggaran pada posisi 93,81% dengan tingkat output kegiatan mencapai 100%.
2. Terdapat beberapa output dengan pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 120%, seperti:
 - a) Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%) dari target 75% mencapai 95,79% (120%)
 - b) Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang) dari target 12.540 orang mencapai 15.629 orang (120%)
 - c) Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar) dari target 14,26 Rupiah Miliar mencapai 25,85 Rupiah Miliar (120%).
 - d) Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang) dari target 2.900 orang mencapai 3.723 orang (120%).
 - e) Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit) dari target 2 mencapai 2 (100%)
 - f) Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit) dari target 2 mencapai 2 (100%)
 - g) Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%) dari target 100 mencapai 100 (100%)
 - h) Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (Indeks) dari target 83 mencapai 85,04 (102,46%)

- i) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%) dari target 85 mencapai 100 (117,65%)
- j) Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (Nilai) dari target 80 mencapai 83,50 (104,38%)
- k) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%) dari target 80 mencapai 97,50 (120%).
- l) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%) dari target 80 mencapai 100 (120%)
- m) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai) dari target 71,50 mencapai 100 (120%).
- n) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok) dari target 50 kelompok mencapai 50 kelompok (100%).

Nilai efisiensi dihitung berdasarkan rentang efisiensi dari -20 sampai +20. Kondisi ini terjadi karena pengukuran output kegiatan dilakukan pada akhir tahun. sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran pada akhir tahun, sehingga diperoleh nilai efisiensi positif (+) Pada tahun 2025 Terdapat 4 IKU dengan efisiensi lebih dari 20 yaitu IKU Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA), Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal, Nilai PNBP Satker BPPP Tegal dengan skor 26,59 serta IKU Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal dengan skor 27,16. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan/minat masyarakat Kelautan Perikanan dalam mengikuti pelatihan dan uji kompetensi Kelautan Perikanan secara signifikan di BPPP Tegal, beberapa diantaranya karena adanya kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan satker/ UPT BPPSDM yang lain sehingga meminimalisir pengeluaran belanja karena pelatihan dilakukan dengan kolaborasi instruktur/pelatih dari BPPP Tegal dan dari satker ybs selain itu juga adanya kebijakan efisiensi / penghematan anggaran dalam belanja operasional pelatihan.

3.4. Lain – lain (Capaian Kinerja BLU)

Pada akhir tahun 2021, BP3 Tegal telah menerima pengesahan sebagai satuan kerja dengan status Badan Layanan Umum (BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 526/KMK.05/2021 tentang Penetapan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tanggal 29 Desember 2021.

Beberapa capaian BLU BPPP Tegal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja tercapai sebanyak 8.942 orang dengan total pelatihan 15.107 orang

2. Optimalisasi Aset

Sesuai PMK Nomor 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU, dalam rangka peningkatan PNBPN Satker BLU dapat melakukan optimalisasi aset. Baik aset BLU maupun aset pihak lain.

BPPP Tegal selama tahun 2025 telah melakukan optimalisasi aset yang dimiliki oleh balai, antara lain:

- Mengembangkan berbagai program pendidikan dan pelatihan baru yang dibutuhkan masyarakat;
- Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana. Salah satunya dengan penyusunan masterplan:

- a) Masterplan kawasan kantor BPPP Tegal

Sebagai pusat pelatihan, BPPP Tegal mutlak harus memiliki fasilitas praktik yang memadai dan mutakhir untuk memastikan para peserta pelatihan benar-benar siap kerja dan tersertifikasi sesuai standar industri. Dibutuhkan rencana strategis untuk mengoptimalkan aset dan lahan BPPP Tegal yang mungkin mengalami ketidakefisienan penggunaan ruang atau penataan bangunan yang tidak terintegrasi seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur baru yang terencana secara komprehensif sangat

diperlukan. Masterplan yang menyeluruh dan terintegrasi harus disusun sebagai pedoman bagi pengembangan fisik BPPP Tegal di masa depan. Rencana induk ini akan memastikan bahwa setiap pembangunan gedung atau fasilitas baru berjalan efisien, efektif, fungsional, dan dapat mendukung visi BPPP Tegal sebagai lembaga pelatihan perikanan berstandar nasional dan internasional.

b) Masterplan kawasan aset Pangandaran

Penyusunan masterplan dimaksudkan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh BPPP Tegal, agar pemanfaatan kawasan aset Pangandaran dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▪ Mengembangkan usaha sampingan seperti:

a) Sewa asrama

Asrama dapat disewa oleh umum maupun peserta pelatihan;

b) Sewa kelas

Kelas digunakan untuk kegiatan pelatihan maupun pertemuan;

c) Sewa aula

Selama tahun 2025 telah digunakan untuk acara pernikahan, pertemuan, dan pelatihan dengan jumlah peserta besar;

d) Katering

Katering menyediakan konsumsi bagi peserta pelatihan maupun kegiatan lainnya;

e) Mall Ikan

Mall Ikan yang berada di BPPP Tegal menyediakan berbagai jenis ikan hias, pakan ikan, maupun beberapa asesoris/kebutuhan untuk akuarium;

f) Kolam renang

Kolam renang dapat digunakan oleh masyarakat umum dengan membayar tiket;

g) Sewa lahan

Pemanfaatan lahan untuk penempatan mesin atm.

▪ **Kerja Sama Kegiatan**

Salah satu yang dilaksanakan oleh BPPP Tegal dalam rangka meningkatkan PNBPN adalah dengan melakukan kerja sama dengan mitra. Selama tahun 2025 BPPP Tegal telah menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama sebanyak 18 dokumen, yaitu PKS dengan:

1. Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
2. Politeknik Negeri Nusa Utara (POLNUSTAR)
3. PT. Paloma Sejati
4. Bank BTN
5. CV. Gus Putra Mandiri
6. PT. Abysatya Mina Anjaya
7. PT. Anugrah Bahari Pasifik
8. PT. Karunia Bahtera Samudra
9. CV. Samudra Hidup Agung
10. Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi
11. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal
12. Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal
13. BDA Sukamandi
14. DPKAKP
15. Klinik Utama Permata As Syifa
16. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
17. PT. Baruna Training Center
18. Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang

- Aset Lain BPPP Tegal

- a. Pulau Cemara

Salah satu aset yang dimiliki oleh BPPP Tegal adalah Pulau Cemara yang berada di Karimunjawa. Saat ini Pulau Cemara ditutup untuk kegiatan wisata. Penutupan bertujuan untuk memulihkan kondisi ekosistem Pulau Cemara.

- b. Aquarium Indonesia

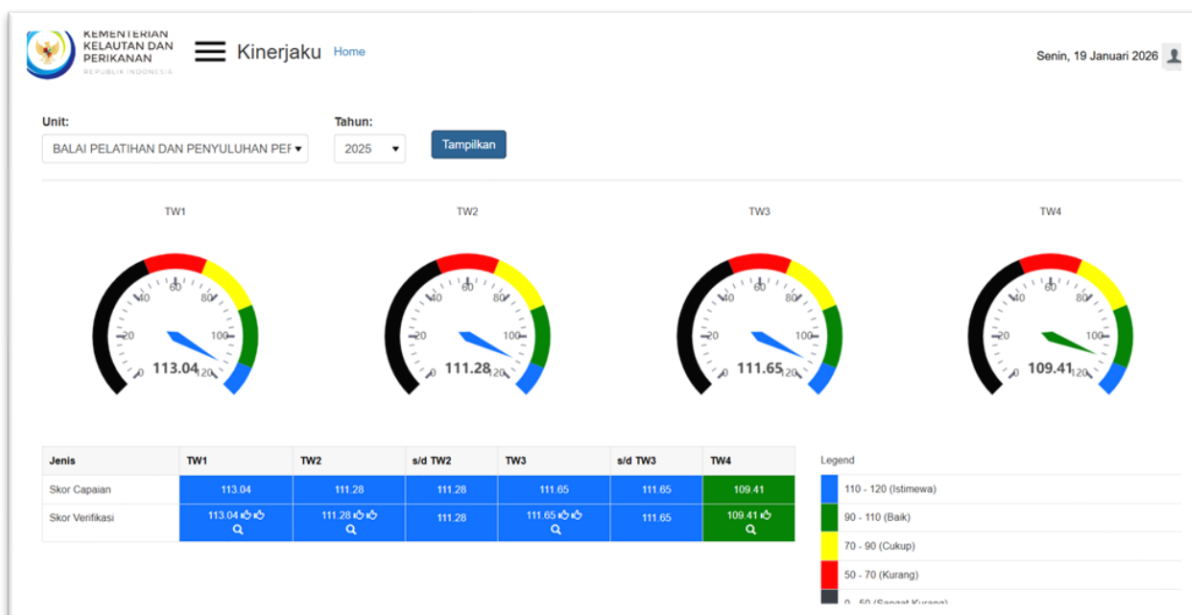
Aquarium Indonesia Pangandaran yang sebelumnya bernama Aquarium Piamari adalah salah satu aset BPPP Tegal yang pemanfaatannya melalui Kerjasama Operasional (KSO). Pemanfaatan Aset dilakukan antara BLU BPPP Tegal dengan PT. Tridacna Banyu Lestari dalam mengelola aset berupa bangunan gedung dan peralatan mesin. Besaran Nilai Kompensasi tetap ditetapkan sebesar Rp. 19.246.061.115 selama masa perjanjian Kerjasama Operasional Tanah dan Bangunan serta aset lainnya milik BPPP Tegal di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat. Imbal hasil 10% dari keuntungan bersih per tahun

BAB IV

PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Tegal Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, besaran data capaian kinerja BPPP Tegal Tahun 2025 sebesar 109,41%, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 12. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Tegal Tahun 2025 pada Dashboard Aplikasi Kinerjaku

Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPPP Tegal yang terukur pada Tahun 2025 terdiri dari 14 (empat belas) indikator yang semuanya menunjukkan ketercapaian terhadap target yang telah ditetapkan, dengan status indikator capaian hijau dan biru. Adapun capaian tersebut antara lain:

Tabel 348. Capaian Kinerja BPPP Tegal Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	
					Capaian	%
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75	95,79	120 (127,72)
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (Orang)	12.540	15.629	120 (124,63)
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	14,26	25,85	120 (181,28)
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (Orang)	2.900	3.723	120 (128,38)
		5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	2	2	100
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (Unit)	2	2	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100	100	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83	85,04	102,46
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85	100	117,65%
			Penilaian Mandiri SAKIP			

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	
					Capaian	%
		10	BPPP Tegal (Nilai)	80	83,50	104,38
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80	97,50	120 (121,88)
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80	100	120 (125)
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (Nilai)	71,5	100	120 (139,86)
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	14	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Tegal (Kelompok)	50	50	100

4.2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut atas rekomendasi pada laporan kinerja triwulan sebelumnya Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 359. Tindak lanjut rekomendasi laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti
1.	Kualitas Pelatih / tenaga kepelatihan masih kurang update dengan regulasi STCWF	Meningkatkan kompetensi tenaga kepelatihan dengan mengikuti berbagai diklat	Tenaga Pelatih telah mengikuti diklat untuk meningkatkan kompetensi	https://drive.google.com/drive/folders/1x7944EOY0zvvnvGb83LHQ5t4XddAlNip?usp=drive link

4.3. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara umum kinerja BPPP Tegal di Tahun 2025 sudah berjalan dengan baik. namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

Tabel 40. Permasalahan dan Rencana Aksi

No.	Permasalahan	Rencana Aksi
1	Kegiatan prasarana berupa jasa pengelola kegiatan rehab kelas Eks SUPM Tegal tidak bisa dilaksanakan dikarenakan anggaran untuk pekerjaan fisik terkena blokir	Melanjutkan kegiatan jasa pengelola kegiatan rehab kelas Eks SUPM Tegal pada tahun berikutnya

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* BPPP Tegal. Data dukung laporan kinerja dapat diakses melalui link https://bit.ly/DADUK_TWIV_BPPP_TEGAL_2025. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Tegal. Akhirnya, BPPP Tegal berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Achmad Subijakto**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : **Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Tegal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Achmad Subijakto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok)	50

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	10,000,000
Total Anggaran BPPP TEGAL		10,000,000

Jakarta, 11 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Tegal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Achmad Subijakto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Subijakto
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lilly Aprilya Pregiawati
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiawati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Achmad Subijakto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (%)	75
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (orang)	12.540
		3	Nilai PNBSP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	14,262
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (orang)	2.900
		5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	2
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	2
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (nilai)	80
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	29.031.269.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.931.954.000
Total Anggaran BPPP TEGAL		44.963.223.000

Jakarta, 17 Desember 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



Ditandatangani
Secara Elektronik

Achmad Subijakto

Lampiran 3. Revisi I Perjanjian Kinerja BPPP Tegal dengan Pusat Pelatihan Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Achmad Subijakto**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Agustus 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal

Achmad Subijakto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (orang)	8.817
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (orang)	17.160
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	14,26
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (orang)	1.300
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	2
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	2
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (nilai)	80
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	34.698.147.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.715.712.000
Total Anggaran BPPP TEGAL		50.413.859.000

Jakarta, 12 Agustus 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiawati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



Achmad Subijakto

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Awal BPPP Tegal dengan Pusat Pelatihan Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Achmad Subijakto**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan
BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal
Achmad Subijakto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Tegal yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (orang)	8.817
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Tegal (orang)	12.540
		3	Nilai PNBSP Satker BPPP Tegal (Rupiah Miliar)	7,81
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Tegal (orang)	530
4	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	1
		6	Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Tegal (unit)	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Tegal (%)	100
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Tegal (indeks)	83
		9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Tegal (%)	85
		10	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Tegal (nilai)	80
		11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Tegal (%)	80
		12	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Tegal (%)	80
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Tegal (nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	21.426.192.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.678.712.000
Total Anggaran BPPP TEGAL		37.104.904.000

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Achmad Subijakto

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Awal BPPP Tegal dengan Pusat Penyuluhan Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAR www.kkp.go.id SUREL pusluhkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Achmad Subijakto**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Tegal


Achmad Subijakto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Tegal (Kelompok)	50

Data Anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	48,800,000
Total Anggaran BPPP TEGAL		48,800,000

Jakarta, 23 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal


Achmad Subijakto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

JALAN MARTOLOYO, P.O. BOX 22 TEGAL, KODE POS 52122
TELEPON (0283) 356393 FAKSIMILE (0283) 322064
LAMAR <https://kkp.go.id/brsdm/bp3tegal> SUREL bppp.tegal@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL
NOMOR : B.8/SK/BBPPP.TGL/KP.110/I/2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, dipandang perlu menetapkan petugas pengelola kinerja yang meliputi pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja dan pengelolaan capaian kinerja;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal;
 - c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
13. Surat Pengesahan DIPA Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.12.2.239188/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL TAHUN 2025. |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Pengelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal, yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini. |
| KEDUA | : | Pengelolaan Kinerja terdiri dari pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, pengisian aplikasi dan pelaporan kinerja sebagaimana Diktum KESATU. |
| KETIGA | : | Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kinerja dengan tugas: <div style="margin-left: 20px;"> A. Pengarah:
 memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja BPPP Tegal. </div> |

- B. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola kinerja BPPP Tegal.
- C. Pelaksana:
1. Ketua:
mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;
 2. Sekretaris;
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan BPPP Tegal dan;
 - b. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pengelola Kinerja BPPP Tegal;
 3. Sub Tim Perencanaan Kinerja
 - a. memastikan bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja telah tersusun dan memuat:
 - 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan, dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. memastikan bahwa Indikator Kinerja:
 - 1) digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indikator kinerja level I maupun level II;
 - 2) Indikator Kinerja eselon I telah selaras dengan IKU;
 - 3) Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C, dan
 - 4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi.
 - c. memastikan bahwa dokumen kontrak kinerja memuat:
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK)
 - a) tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matriks cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) rincian target IKU secara bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing masing IKU;
 - 3) matriks cascading kinerja kepada penanggungjawab IKU;
 - 4) rencana aksi atas PK dan evaluasinya.

- d. memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;
 - e. memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
4. Sub Tim Pengukuran Kinerja
- a. menyusun mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan);
 - c. memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - d. mengoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
5. Sub Tim Pelaporan Kinerja
- a. mengoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan);
 - b. memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - d. memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di unggah ke dalam laman resmi; dan
 - e. mengoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
6. Sub Tim Evaluasi Kinerja
- a. melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - c. melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan;
 - d. menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; dan

- e. mengoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

7. Sub Tim Verifikasi Kinerja

- a. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
- b. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
- c. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
- d. memastikan seluruh *softcopy* data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi daring; dan
- e. mengoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengelolaan Kinerja menyusun dan melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal per triwulan (Interim) dan Tahunan (Laporan Kinerja/LKj).
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.
- KEENAM : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan dalam penetapan, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
 Pada Tanggal : 02 Januari 2025
 Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
 Perikanan Tegal



Achmad Subijakto

Tembusan:
 Yang bersangkutan;

Lampiran I. Surat Keputusan Kepala BPPP Tegal
tentang Tim Pengelolaan Kinerja Tahun 2025 Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal .
Nomor : B.8/SK/BPPP.TGL/KP.110/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL**

A. Pengarah

Kepala Pusat Pelatihan KP

B. Penanggung Jawab

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal

C. Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Yuda Adyatama Firmansyah, S. E	Kepala Subbagian Umum	Ketua
2	Qonita Hidayana, A. Md	Pengelola Program dan Laporan	Sekretaris
Sub Tim Perencanaan Kinerja			
1	Seto Satrio Ginasib, S.Pi	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Koordinator
2	Ade Yunaifah Afriyani, S.E, M.Pi	Widyaiswara Ahli Muda	Anggota
3	Ratih Mahargiani, S.Pi, M.Si	Penyusun Program Penyelenggara Diklat	Anggota
Sub Tim Pengukuran Kinerja			
1	Rika Putri, S. St. Pi, M.P	Widyaiswara Ahli Madya	Koordinator
2	Nur Hidayah, S.Pi	Pengelola Program dan Laporan	Anggota
3	Trias Wahyuning Putri, S.Pi, M.Pi	Widyaiswara Ahli Madya	Anggota
Sub Tim Pelaporan Kinerja			
1	Lutfi Jauhari, S.St.Pi., M.Si	Widyaiswara Ahli Madya	Koordinator
2	Agus Widiyanto, S.St.Pi, M.Pi	Widyaiswara Ahli Muda	Anggota
3	Miftah Farid, A.Md., S.ST.Pi	Instruktur Penyelia	Anggota
Sub Tim Evaluasi Kinerja			
1	Eko Widayanto Nugroho, S.Pi	Analisis Materi Penyuluhan	Koordinator
2	Uli Safriani, S. Kel., M.I.L	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
3	Nur Azizah, S. AP	Analisis SDM Aparatur	Anggota

Sub Tim Verifikasi Kinerja			
1	Dedi Hertono, S.St.Pi, M.Pi,	Perencana Muda	Koordinator
2	Septa Hadi Nugroho, S. E	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
3	Ahmad Harianto, S.Pi	Instruktur Muda	Anggota

Mengetahui
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Tegal



Achmad Subijakto